

**Peran Pemuda Pancasila Dalam Pengelolaan Parkir Tepi Jalan Prof.
Dr. Hamka Ngaliyan Semarang**

Skripsi

Program Studi:

Sarjana - S1

Jurusan Ilmu Politik



DiSusun Oleh:

Aqil Fa'iq Rizki Hadi Saputra

2006016076

Progam Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Negeri Walisongo Semarang

Tahun Ajaran 2024

Persetujuan Pembimbing

NOTA PEMBIMBING

Hal: Persetujuan Naskah Skripsi

Kepada:

Yth.Dekan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu

Politik UIN Walisongo

Semarang

Di Semarang

Assalamu'alaikum. Wr. Wb.

Setelah membaca, mengadakan koreksi dan perbaikan sebagaimana mestinya, maka kami menyatakan bahwa naskah skripsi saudara/i:

Nama : Aqil Fa'iq Rizki Hadi Saputra

NIM : 2006026001

Jurusan : Ilmu Politik

Judul Skripsi : Peran Pemuda Pancasila dalam Pengelolaan Parkir Tepi Jalan Prof. Dr. Hamka
Ngaliyan Semarang

Dengan ini telah saya setujui dan mohon agar segera diujikan. Demikian atas perhatiannya,
diucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 3 Desember 2024
Pembimbing,



Muhammad Nuqlir Bariklana, M.Si
NIP. 1985050220190310

LEMBAR PENGESAHAN

SKRIPSI

PERAN PEMUDA PANCASILA DALAM PENGELOLAAN PARKIR TEPI JALAN
PROF. DR. HAMKA NGALIYAN SEMARANG

Disusun Oleh:

Aqil Fa'iq Rizki Hadi Saputra

NIM. 2006016076

Telah dipertahankan di depan majelis penguji skripsi

Pada tanggal 10 Desember 2024 dan dinyatakan lulus.

Sususan Dewan Penguji

Ketua Sidang

Sekertaris Sidang



Muhammad Nuqlir Bariklana, M. Si
NIP. 1985050220190310

Solkhah Mufrikhah, M.Si
NIP. 198505102023212058

Penguji Utama

Pembimbing

Masrohatun, M. Si
NIP. 1985050220190310

Muhammad Nuqlir Bariklana, M. Si
NIP. 198806212018012001

Pernyataan

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi saya dengan judul **“Peran Pemuda Pancasila dalam Pengelolaan Parkir Tepi Jalan Prof. Dr. Hamka Ngaliyan Semarang”** merupakan hasil karya penulisan saya sendiri dan didalamnya tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di UIN Walisongo Semarang atau lembaga tinggi lainnya. Pengetahuan dan informasi yang diperoleh dari hasil penerbit maupun belum/tidak di terbitkan, sumbernya di cantumkan sebagai sumber referensi yang diperoleh dari hasil penerbit maupun belum/tidak di terbitkan, sumbernya di cantumkan sebagai sumber referensi yang menjadi bahan rujukan.

Semarang, 22 Desember 2024

Yang Menyatakan,



Aqil Fa'iq Rizki Hadi Saputra

NIM: 2006016076

Kata Pengantar

Assalamualaikum Wr. Wb

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Peran Pemuda Pancasila dalam Pengelolaan Parkir Tepi Jalan Prof. Dr. Hamka Ngaliyan Semarang”. Shalawat dan salam penulis haturkan kepada pemimpin umat Islam Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umatnya menjadi umat yang berakhlakul karimah, memiliki pengetahuan dan intelektual. Skripsi ini diajukan untuk memenuhi syarat guna memperoleh gelar Sarjana Ilmu Politik S1 (S.Sos) pada jurusan Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang. Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan rasa syukur atas rahmat kepada berbagai pihak yang telah memberikan bantuan moril maupun materiil baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap penulis dalam menyelesaikan skripsi ini hingga selesai. Untuk itu, penulis menyampaikan banyak terima kasih kepada:

1. Rektor UIN Walisongo Semarang Prof. Dr. Nizar, M.Ag., yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengenyam pendidikan dan menyelesaikan studi Ilmu Politik di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang.
2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Prof. Dr. H. Imam Yahya, M.Ag selaku penanggung jawab terhadap berlangsungnya proses belajar menagajar di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang.
3. Kepala jurusan Ilmu Politik Fisip UIN Walisongo, M. Nuqlir Bariklana, M.Si sekaligus merupakan dosen pembimbing dan wali dosen penulis yang telah memberikan arahan, masukan, meluangkan waktu dan memberikan dukungan dalam proses penyusunan skripsi.

4. dan Sekretaris jurusan Ilmu Politik Fisip UIN Walisongo, Masrohatun, M.Si yang telah memberikan pengarahan dan ilmunya khususnya dalam pelaksanaan perkuliahan.
5. Seluruh jajaran dosen di lingkungan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan berbagai ilmu dan pengalamannya sehingga dapat bermanfaat dan sangat berguna bagi penulis.
6. Seluruh Civitas Akademik dan Staf Administrasi Fisip Politik UIN Walisongo Semarang yang telah membantu memperlancar segala keperluan penulis dalam penyusunan dan penyelesaian skripsi.
7. Dua orang paling berjasa dalam hidup penulis yaitu keluarga saya, Bapak Hadi Sucipto, Ibu Sutini, dan adek bunga syafiqoh atas kepercayaan yang diberikan untuk bisa menyelesaikan studi S1 dengan tiada henti memberikan dukungan moral maupun materil baik semangat, doa, finansial dan nasihat serta untuk keluarga yang turut memberikan semangat sehingga penulis bisa menyelesaikan tahap penyusunan dan penulisan skripsi ini.
8. Seluruh informan Bapak Mukhtar Ketua Pemuda Pancasila Naliyan, Bapak Hendra, Mas Yudi, Mas Bimo, Mas Edi, dan Bapak H yang telah membantu saya dalam melengkapi data-data peneliti.
9. Sahabat-sahabat penulis; Moh. Erza, Gilang Sangsaka, Alfathoni Alama Jidan, Riyand Ardiyansah, Key A.S, dan Moh. Fadli
10. Teman-teman Sema Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 2022-2023; Ridho Gilang, Reza Arinal Haq, Raihan Ardiyansah, Galuh Tiasari
11. Kepada wanita ke-3 dalam hidup saya Elsa Sabina Putri Latifah yang menemani dalam proses penulisan skripsi.
12. Semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi yang tidak bisa disebutkan satu persatu.
13. Tidak lupa kepada diri sendiri yang selalu berjuang sejauh ini untuk menyelesaikan dan menyusun skripsi

Terlepas dari semua ini, penulis menyadari sepenuhnya bahwa masih ada kekurangan baik dari segi susunan kalimat maupun tata bahasa. Oleh karena itu saran dan kritik yang bersifat membangun sangat penulis harapkan. Akhir kata penulis berharap mudah mudahan skripsi ini memberikan manfaat baik bagi penulis maupun referensi penelitian sejenis dan para pembaca yang membutuhkan karya tulis ilmiah ini.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Persembahan

Dengan mengucapkan segala syukur kepada Allah SWT Pencipta Semesta Alam Karya ini penulis persembahkan kepada Kedua orang tua penulis yang telah menjadi sosok inspirasi dan motivasi melalui irungan doa, nasihat, serta kasih sayang dalam setiap langkah kehidupan penulis. Dosen Pembimbing sekaligus mentor saya, M. Nuqlir Bariklana, M.Si yang telah memberikan ilmu dan bimbingannya serta motivasi untuk menyelesaikan karya tulis ilmiah ini. Para dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Politik UIN Walisongo serta teman-teman yang telah mengajarkan kebajikan dan ilmu kepada penulis. Semoga setiap ilmu yang diajarkan bisa bermanfaat dan maslehat bagi sesama. Dan untuk Almamater UIN Walisongo Semarang, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang menjadikan tempat berpijak untuk menuntut ilmu yang berguna bagi kehidupan masa depan penulis.

Motto Hidup

Hiduplah seperti pohon kelapa, dimana pun keberadaannya pasti memiliki manfaat untuk sekitarnya dan dapat tumbuh di berbagai lingkungan tanpa merasak sekitar. Dan hiduplah seperti serigala yang memiliki jiwa pantang menyerah.

Tetaplah hidup walaupun berada dikeadaan terburuk dalam hidup.

ABSTRAK

Penelitian ini membahas peranan Pemuda Pancasila dalam pengelolaan parkir tepi jalan serta dampaknya terhadap ketertiban dan kenyamanan publik di Jalan Prof. Dr. Hamka Ngaliyan Semarang. Pemuda Pancasila, sebagai salah satu organisasi kepemudaan, sering terlibat dalam pengelolaan parkir tepi jalan, terutama di daerah Kecamatan Ngaliyan. Peran mereka meliputi pengaturan kendaraan, pengawasan keamanan, dan penarikan tarif parkir yang diklaim dapat mendukung ketertiban lalu lintas dan memberikan lapangan kerja bagi anggota organisasi. Namun, peran tersebut juga menuai kritik terkait regulasi dan potensi konflik kepentingan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan wawancara dan observasi untuk memahami bagaimana Pemuda Pancasila mengelola parkir tepi jalan, dampak peran mereka terhadap masyarakat, dan persepsi publik terhadap aktivitas ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan Pemuda Pancasila dalam pengelolaan parkir tepi jalan dapat memberikan manfaat ekonomi bagi anggotanya namun berpotensi menimbulkan tantangan dalam hal pengawasan serta transparansi tarif parkir. Rekomendasi yang diajukan adalah pengembangan regulasi yang lebih ketat serta kerja sama dengan pemerintah daerah untuk meminimalkan dampak negatif dan meningkatkan profesionalisme dalam pengelolaan parkir tepi jalan.

Kata Kunci: peranan, Pemuda Pancasila, pengelolaan, parkir tepi jalan.

ABSTRACT

This study discusses the role of Pemuda Pancasila in managing roadside parking and its impact on public order and convenience. Pemuda Pancasila, as a youth organization, is often involved in roadside parking management, particularly in urban areas. Their roles include vehicle arrangement, security supervision, and collection of parking fees, which are claimed to support traffic order and provide employment opportunities for organization members. However, this role has also faced criticism regarding regulations and potential conflicts of interest. This study employs a qualitative method through interviews and observations to understand how Pemuda Pancasila manages roadside parking, the impact of their role on society, and public perceptions of this activity. The findings indicate that Pemuda Pancasila's involvement in roadside parking management can provide economic benefits to its members but also poses challenges in terms of supervision and parking fee transparency. The recommendations proposed include stricter regulations and cooperation with local governments to minimize negative impacts and enhance professionalism in roadside parking management.

Keywords: role, Pemuda Pancasila, management, roadside parking.

DAFTAR ISI

Persetujuan Pembimbing.....	ii
Pengasahan Skripsi	iii
Pernyataan	iii
Kata Pengantar	iv
Persembahan	vii
Motto Hidup.....	viii
ABSTRAK.....	ix
ABSTRACT.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
Daftar Gaambar	xiii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Tinjauan Pustaka	7
F. Kerangka Teori.....	12
G. Metode Penelitian.....	15
H. Sistematika Penelitian.....	20
BAB II.....	23
KAJIAN TEORI	23
A. Parkir Tepi Jalan	23
B. Organisasi Informal dalam Tata Kelola Parkir	26
C. Teori State and Illegality	28
BAB III	39
PROFIL KOTA SEMARANG DAN KECAMATAN NGALIYAN, PARKIR TEPI JALAN, DAN PEMUDA PANCASILA DI KECAMATAN NGALIYAN	39

A. Profil Kota Semarang dan Kecamatan Ngaliyan	39
1. Kondisi Geografis.....	39
2. Kondisi Demografis	41
3. Kondisi Sosial, Politik, Ekonomi	43
B. Parkir Tepi Jalan Kecamatan Ngaliyan.....	49
C. Profil Pemuda Pancasila Kecamatan Ngaliyan	51
BAB IV	59
Bagaimana Peran Pemuda Pancasila dalam Pengelolaan Parkir Tepi Jalan	59
A. Kebijakan Parkir Tepi Jalan Kota Semarang	59
B. Aktor yang terlibat dalam Pengelolaan Parkir	61
C. Pemuda Pancasila Sebagai Aktor Internal dalam Pengelolaan Parkir	63
D. Peran Pemuda Pancasila dalam Pengelolaan Parkir.....	65
E. Relasi Kuasa Pemuda Pancasila dan Pemerintah dalam Pengelolaan Parkir...	76
BAB V.....	79
Dampak Peran Pemuda Pancasila dalam Pengelolaan Parkir Tepi Jalan Kepada Masyarakat Sekitar.....	79
1. Dampak Positif.....	80
BAB VI	94
KESIMPULAN DAN SARAN.....	94
A. Kesimpulan	94
B. Saran.....	96
DAFTAR PUSTAKA	98
LAMPIRAN.....	103
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	105

Daftar Gaambar

Gambar 1. 1	2
Gambar 1. 2	2
Gambar 2. 1 Jenis-jenis Parkir.....	25
Gambar 3. 1 Peta Kota Semarang	40
Gambar 3. 2 Peta Adminlstrasi Kecamatan Ngaliyan.....	41
Gambar 3. 3 Tabel Jumlah Penduduk Kecamatan Ngaliyan	43
Gambar 3. 4 Titik Pertama Terjadinya Parkir Tepi Jalan.....	50
Gambar 3. 5 Titik Kedua Terjadinya Parkir Tepi Jalan.....	50
Gambar 3. 6 Mako (Markas Komando) Pemuda Pancasila Ngaliyan	57
Gambar 4. 1 Pemuda Pancasila Dalam Acara Donor Darah.....	72
Gambar 4. 2 Pemuda Pancasila Keterlibatan Pada Pemerintah Daerah	74

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pertumbuhan cepat populasi di perkotaan menyebabkan tuntutan akan infrastruktur yang tinggi, karena kehidupan perkotaan sangat bergantung pada fasilitas dan prasarana yang mendukung mobilitas penduduk dalam rangka memberikan pelayanan publik yang optimal. Permasalahan perparkiran bukanlah hal baru dan seringkali menjadi tantangan dalam sistem transportasi. Baik di kota besar maupun kota yang sedang berkembang permasalahan parkir tepi jalan. Masalah perparkiran masih menjadi isu yang serius, terutama di kota-kota besar di mana parkir di sebagian badan jalan seringkali menyebabkan kemacetan lalu lintas yang signifikan (Hafifah, 2020). Kota Semarang merupakan salah satu wilayah yang mengalami pertumbuhan pesat dengan peningkatan jumlah penduduk setiap tahunnya. Banyak permasalahan dalam pengelolaan parkir, seperti adanya pengelola parkir yang tidak bertanggung jawab penyebab kemacetan lalu, dan tingginya angka pelanggaran parkir.

Banyak masyarakat yang tidak bertanggung jawab dan mencoba memanfaatkan tempat parkir informal untuk kepentingan pribadi, sehingga menimbulkan permasalahan yang sangat merugikan masyarakat. Masalah ini muncul karena kurangnya perhatian dari Pemerintah Kota Semarang terhadap masalah parkir. Jika masalah parkir ini terus diabaikan, dampaknya akan menjadi kompleks dan sulit untuk diselesaikan. Pada jalan Prof. Dr. Hamka Ngaliyan Semarang parkir tepi jalan merupakan perilaku sosial yang mudah ditemui sehari-hari. Fenomena ini menyebabkan jalan menjadi sempit dan menjadi tempat parkir tepi jalan sehingga sangat mengganggu pengendara lain.

Fenomena parkir pinggir jalan yang dilakukan pedagang kaki lima semakin memperburuk situasi lalu lintas, terutama pada jam sibuk pagi dan sore

hari. Seringkali pengemudi memarkir mobilnya sembarangan di dekat pedagang kaki lima untuk melakukan pembelian cepat atau karena keterbatasan tempat parkir. Akibatnya, jalan yang harus dilalui kendaraan menjadi lebih sempit sehingga mengurangi kapasitas jalan dan menimbulkan kemacetan.



Gambar 1. 1



Gambar 1. 2

Pada gambar 1, ketika pagi hari terdapat parkir di tepi jalan yang bertepatan di Jalan Prof. Dr. Hamka Ngaliyan yang mana menyebabkan kemacetan serta rawannya kecelakaan pada titik ruko-ruko sekitar jam 05.59 dimana waktu tersebut banyak masyarakat yang sedang membeli sarapan dan memparkirkan kendaraannya di tepi jalan yang memekan badan jalan. Pada gambar 2, ketika sore menjelang maghrib sekitar jam 17.59 pada jam tersebut banyak masyarakat yang pulang kantor ataupun kuliah dan masyarakat yang mencari makan atau jajan, hal ini yang menjadi penyebab kemacetan lalu lintas pada titik tersebut banyaknya pedagang kaki lima (PKL) yang beroperasi dan para pembeli parkir kendaraan pada badan jalan karena kurangnya lahan parkir.

Kepadatan aktivitas di pusat kota, sejalan dengan peningkatan jumlah kendaraan, mengakibatkan permintaan tempat parkir yang tinggi karena banyak pengunjung yang datang dengan kendaraan dan perlu tempat parkir untuk berbagai keperluan, terutama parkir di sisi jalan. Di pusat kota, ruang parkir terbatas terutama di area parkir di luar sisi jalan. Jika tidak tersedia cukup tempat parkir, masyarakat cenderung menggunakan sisi jalan sebagai alternatif, yang dapat memperburuk lalu lintas dengan menyebabkan kemacetan terutama pada jam-jam sibuk, baik pagi maupun sore hari (Arma, 2023). Peningkatan

jumlah kendaraan bermotor telah mendorong kebutuhan akan kegiatan parkir sebagai dukungan untuk aktivitas masyarakat yang beragam. Regulasi terkait penyelenggaraan parkir telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tersebut, parkir diartikan sebagai situasi di mana kendaraan tidak bergerak karena berhenti dan ditinggalkan oleh pengemudi dalam jangka waktu tertentu. Konsep berhenti sendiri dijelaskan sebagai kondisi ketika kendaraan tidak bergerak, baik untuk jangka waktu lama maupun singkat. Pemerintah Daerah, melalui Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Semarang, menetapkan kebijakan terkait pengelolaan parkir serta pungutan pajak parkir. Pengelolaan dan tarif pajak parkir dapat bervariasi antar tempat dan daerah, yang menyebabkan perbedaan peraturan daerah Kota Semarang.

Kegiatan parkir tepi jalan, selain tidak memiliki izin resmi dari pemerintah daerah, juga menimbulkan ketidaknyamanan dan kekhawatiran bagi masyarakat umum, terutama saat terjadi di tempat ramai seperti pasar. Keterbatasan infrastruktur parkir menjadi peluang bagi para pengangguran untuk melakukan parkir tepi jalan demi mencari keuntungan. Mereka seringkali membenarkan tindakan mereka sebagai pemuda setempat, namun hal ini menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan sekitar dan merugikan masyarakat secara keseluruhan (Sutrisno, 2023). Parkir tepi jalan adalah aktivitas parkir yang melanggar aturan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah. Hal ini terjadi ketika terjadi pelanggaran aturan dalam melakukan parkir sesuai dengan ketentuan yang berlaku, termasuk parkir yang dilakukan oleh oknum juru parkir ilegal yang bertujuan untuk menghasilkan keuntungan pribadi tanpa memperhatikan hak-hak orang lain. Parkir tepi jalan terjadi ketika kendaraan diparkir secara ilegal atau tidak resmi tanpa izin resmi dari pemerintah setempat, sehingga uang parkir yang diperoleh tidak disetor ke

pemerintah daerah. Dengan demikian, parkir tepi jalan merupakan praktik ilegal yang merugikan masyarakat dan pemerintah daerah, serta tidak berada dalam pengawasan atau pembinaan pemerintah setempat (Bahari, 2021).

Pengelolaan parkir di badan jalan merupakan aspek penting dalam pengelolaan lalu lintas perkotaan. Dalam konteks ini, organisasi informal telah muncul sebagai aktor yang mempunyai peran penting dalam pengelolaan ruang parkir, dan sering kali beroperasi di luar kerangka formal yang ditetapkan oleh pemerintah. Allifandi (2017) Organisasi informal pengelola parkir ini melibatkan para penyelenggara negara dan aktor-aktor dalam masyarakat yang mempertukarkan sumberdaya ekonomi dan sumberdaya kekuasaan dalam informal market. Sedangkan Irawan (2018) Organisasi informal adalah struktur sosial yang saling terkait yang mengatur bagaimana orang bekerja sama dalam suatu kegiatan. Organisasi informal sering kali muncul untuk mengisi kekosongan dalam pengelolaan parkir formal. Dalam konteks pengelolaan parkir, Pemuda Pancasila berperan sebagai pengawas dan penegak peraturan serta berkontribusi dalam meningkatkan kedisiplinan dan ketertiban di tempat parkir. Organisasi yang terkait ialah Pemuda Pancasila, Organisasi dapat diciptakan dipengaruhi oleh beberapa aspek, seperti perpaduan visi dan misi serta tujuan yang sama untuk mewujudkan keberadaan sekelompok orang tersebut dalam masyarakat. Organisasi yang baik adalah organisasi yang diakui oleh masyarakat sekitar melalui kontribusinya (Wiguna K. C., 2015).

Peran organisasi informal dalam konteks parkir penting karena beberapa alasan yang berkaitan dengan efisiensi, keamanan, ekonomi, dan keadilan sosial. Dalam hal ini, *State and Illegality* dapat menggantikan peran negara dalam menjamin kesejahteraan masyarakat lokal melalui aktivitas ekstraktif di wilayahnya. Organisasi informal sering kali terdiri dari anggota komunitas lokal yang dikenal dan dipercaya oleh masyarakat. Secara keseluruhan, kombinasi antara kepercayaan, kecepatan, fleksibilitas, dan lokalitas berarti bahwa masyarakat cenderung lebih patuh pada organisasi

informal dibandingkan pemerintah formal dalam hal pengelolaan parkir dan aspek kehidupan lainnya. Pengelolaan parkir seringkali menghadapi tantangan seperti parkir liar dan penyalahgunaan wewenang oleh oknum tertentu. Dalam konteks ini, Pemuda Pancasila berperan sebagai organisasi kemasyarakatan yang dapat membantu pemerintah dalam pengawasan dan pengelolaan retribusi parkir. Menurut beberapa pemberitaan, pemuda Pancasila sering dilibatkan dalam pengelolaan parkir, namun tindakan mereka terkadang menimbulkan kontroversi. Praktik ini menimbulkan kegelisahan di kalangan pengunjung, sehingga peran mereka dalam pengelolaan parkir tidak selalu diterima dengan baik oleh masyarakat setempat.

Studi tentang kebijakan dinas perhubungan ini telah diteliti dan dikaji oleh para terhadulu dalam kasus *State and Illegality* pada pengelolaan parkir tepi jalan. Arijesni, Bandiyah, dan Noak (2019) Negara dan ilegalitas muncul dikarenakan ilegalitas adalah kegiatan yang sering kali disembunyikan, pelaku yang terlibat biasanya memiliki minat kuat untuk menyembunyikan hal tersebut karena mereka takut akan hukum atau kesulitan sosial. Oleh Ristono (2023) *State and illegality* adalah kegiatan illegal yang dilakukan oleh aktor – aktor negara yang terkait dengan negara sebaiknya tidak menganggapnya sebagai pelanggaran dari fungsi negara yang standar melainkan sebagai bagian dari cara negara beroperasi. Menyoroti pentingnya memahami interaksi antara struktur formal dan informal dalam konteks pemerintahan untuk mengembangkan kebijakan yang lebih efektif dan adil.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas dapat digambarkan bahwa fenomena perparkiran yang di gambarkan tidak terealisasinya kebijakan Pemerintah Kota Semarang Terhadap Pengelolaan Parkir Tepi Jalan Umum. Oleh karena itu, perlu adanya inovasi dan sangat dibutuhkan perhatian khusus dari pemerintah. Sehingga, tidak terdengar lagi keluhan dari masyarakat terkait pengelolaan parkir di tepi jalan umum di Jalan Prof.Dr. Hamka Ngaliyan Kota Semarang. Maka penulis akan melakukan penelitian berjudul **“Peran Pemuda**

Pancasila dalam Pengelolaan Parkir Tepi Jalan Prof. Dr. Hamka Ngaliyan Semarang”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas peneliti mendapatkan beberapa rumusan masalah, sebagai berikut:

1. Bagaimana peran Pemuda Pancasila dalam pengelolaan parkir tepi jalan?
2. Apa dampak dari peran Pemuda Pancasila tersebut kepada masyarakat sekitar?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah peneliti ini maka tujuan penelitiannya adalah, sebagai berikut:

1. Menganalisis peran yang dimainkan oleh Pemuda Pancasila dalam pengelolaan parkir tepi jalan.
2. Menganalisis dampak keberadaan Pemuda Pancasila pada pengelolaan parkir atau pengguna parkir tepi jalan kepada masyarakat sekitar.

D. Manfaat Penelitian

Dari penjelasan yang ditulis pada rumusan masalah dan tujuan penelitian, maka dengan adanya penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi peneliti dan pembacanya diantaranya sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara Teoritis, penulisan studi ini bisa membantu Jurusan Ilmu Politik, khususnya FISIP Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang atupun masahasiswa lain, dalam mengembangkan ilmu pengetahuan mengenai peran organisasi informal dalam

pengelolaan parkir tepi jalan umum. Penelitian ini akan memberikan kontribusi pada literatur akademis tentang pengelolaan organisasi informal dan fasilitas umum, khususnya parkir. Memahami peran dan dinamika organisasi informal dalam konteks ini dapat memperluas cakupan literatur akademis untuk memasukkan perspektif yang lebih holistik mengenai pengelolaan perkotaan. Peneliti lain dapat menggunakan hasil ini untuk mempelajari lebih lanjut berbagai aspek terkait, seperti hubungan antara organisasi informal dan keselamatan parkir serta dampak ekonomi dari pengelolaan parkir oleh organisasi informal.

2. Manfaat Praktis

Secara Praktis, penulisan studi bisa sebagai sumber pengetahuan serta menambah wawasan bagi masyarakat luas agar lebih sadar dalam menaati peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah. Memahami peran dan kontribusi organisasi informal dapat meningkatkan pengelolaan parkir. Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk menyusun strategi pengelolaan dan pemanfaatan ruang parkir di perkotaan yang lebih efektif sehingga dapat mengurangi permasalahan kemacetan dan meningkatkan kepuasan pengguna parkir. Organisasi informal seringkali terdiri dari anggota masyarakat lokal. Dengan mengakui dan mendukung peran mereka, penelitian ini dapat mendorong pemberdayaan masyarakat lokal dan meningkatkan partisipasi mereka dalam pengelolaan lembaga publik.

E. Tinjauan Pustaka

Pada pembahasan terkait peran organisasi informal dalam pengelolaan parkir sudah beberapa kali dilakukan oleh sejumlah ahli atau peneliti. Temuan

dari kajian pustaka ini adalah tentang parkir tepi jalan dan organisasi informal dalam tata kelola parkir.

1. Parkir Tepi Jalan

Parkir merupakan bagian atau aspek yang tidak terpisahkan dari kebutuhan sistem transportasi, karena suatu perjalanan dengan kendaraan pribadi biasanya selalu dimulai dan diakhiri di tempat parkir. Pada dasarnya parkir merupakan kebutuhan umum dan harus diatasi terlebih dahulu. Berdasarkan fitur ini, ruang parkir disesuaikan dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat yang bepergian dengan mobil atau mengakses suatu lokasi (Ramadani, 2023). Parkir tepi jalan merujuk pada kendaraan yang diparkir di lokasi yang bukan merupakan tempat parkir resmi atau memiliki rambu larangan parkir/berhenti. Peningkatan jumlah kendaraan, baik milik penduduk maupun wisatawan, menyebabkan peningkatan kasus parkir tepi jalan di berbagai lokasi. Permasalahan ini tidak hanya terkait dengan infrastruktur, tetapi juga menyangkut perubahan perilaku disiplin masyarakat. Parkir tepi jalan mengacu pada parkir di sisi jalan. Oleh karena itu, parkir jenis ini menempati sebagian jalan dan dapat mengakibatkan penyempitan jalan dan berkurangnya kapasitas jalan (Anwar, 2023).

Aktivitas parkir tepi jalan, selain tidak adanya izin resmi dari pemerintah setempat, umumnya sangat meresahkan masyarakat, apalagi terjadi di tempat keramaian seperti pasar. Kemacetan akibat parkir tepi jalan tidak hanya membuat takut masyarakat, tapi juga membuat resah para pedagang (Sutrisno, 2023). Parkir tepi jalan sering dijumpai, dan kemacetan yang sangat parah sering terjadi karena masyarakat memarkir mobilnya di pinggir jalan dan menghambat arus lalu lintas (Putra, 2022). Dalam hal ini, parkir tepi jalan lebih tepat diartikan sebagai keadaan dimana kendaraan tidak

parkir sesuai dengan tempat yang disediakan (Jolian, 2020). Parkir tepi jalan merupakan masalah serius bagi masyarakat setempat. parkir tepi jalan di kawasan yang tidak memiliki fasilitas parkir yang layak menimbulkan berbagai dampak negatif terhadap kehidupan sehari-hari warga. Hal ini juga menimbulkan ketidaknyamanan bagi warga karena mobil yang diparkir berantakan dapat menghalangi akses jalan (Putranto, 2023).

Parkir di perkotaan masih menjadi permasalahan, terutama terkait kinerja parkir dan arus lalu lintas, serta berpotensi menimbulkan kemacetan. Oleh karena itu, pengetahuan tentang kinerja parkir sangat penting untuk evaluasi yang komprehensif (Suraji, 2023). Parkir tepi jalan menjadi kendala terbesar bagi Pemerintah Kota Semarang dalam mengelola parkir jalan umum dengan baik. Ada bukti bahwa kacaunya pengelolaan parkir Kota Semarang juga disebabkan oleh campur tangan pihak lain di luar Pemerintah Kota Semarang (Hutabarat, 2019).

Kendala utama masalah parkir pinggir jalan ialah kurangnya lahan parkir, hal tersebut sangatlah mengganggu pengguna jalan bahkan sampai menyebabkan kemacetan. Dimana tempat parkir tepi jalan tersebut bersifat tidak resmi atau ilegal, sehingga yang terjadi adalah sebagian bada jalan dan trotoar yang disulap menjadi tempat parkir (Gunawan, 2023). Masyarakat belum memahami aturan parkir di jalan sehingga mereka menggunakan jalan yang tidak bisa dijadikan tempat parkir mobilnya atau memarkir mobilnya sembarangan situasi ini tentu dapat memperburuk kemacetan jalan raya (Rusnaedi, 2022).

2. Organisasi Informal dalam Tata Kelola Parkir

Organisasi informal seringkali mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh organisasi formal, seperti pengelola parkir.

organisasi informal dapat menjadi sumber informasi dan dukungan penting bagi organisasi formal (Irawan, 2018). Organisasi informal sering kali bekerja sama dengan pemerintah untuk mengelola parkir secara lebih efektif, Hubungan antara lembaga pemerintah dan organisasi informal dapat meningkatkan pengelolaan parkir di ruang milik jalan. Kolaborasi dengan pemerintah dalam pengelolaan parkir memerlukan partisipasi berbagai organisasi informal untuk menciptakan sistem parkir yang efisien, aman dan tertib. Pemerintah bekerja sama dengan organisasi informal untuk mengumpulkan masukan dalam mengembangkan kebijakan parkir yang memenuhi kebutuhan dan kondisi. Organisasi informal dilibatkan dalam pemantauan dan evaluasi implementasi pedoman ini di lapangan. Melaksanakan program pendidikan dan pelatihan bersama bagi warga sekitar dan pengelola parkir untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya pengelolaan parkir yang baik (Sari, 2023). Mengelola biaya parkir merupakan aspek penting dalam pengelolaan taman dimana organisasi informal berperan. Organisasi informal seperti komunitas lokal dan kelompok pemuda dapat berperan dalam berbagai tahapan pengelolaan harga parkir (Novita, 2012).

Organisasi informal meningkatkan komunikasi antar pengguna taman dan secara positif mempengaruhi kepuasan pengguna. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan interpersonal yang baik akan menimbulkan suasana yang lebih tertib dan efisien dalam pemanfaatan ruang parkir (Handayani, 2020). Organisasi informal dapat mempercepat proses administratif, mengurangi kemacetan, dan berkontribusi pada pengalaman pengguna yang lebih baik. Hal ini menyoroti pentingnya peran organisasi informal dalam menciptakan sistem parkir yang lebih responsif (Setiawan, 2021).

Organisasi informal dapat membantu mengelola penggunaan ruang parkir dengan lebih efektif, terutama di kawasan yang ruangnya terbatas. Mengetahui bahwa organisasi informal dapat bertindak sebagai perantara antara pengguna dan pengelola parkir (Aminah, 2022). Partisipasi masyarakat meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan taman dan menciptakan rasa kepemilikan terhadap ruang publik. Menyoroti bahwa partisipasi masyarakat dalam pengelolaan parkir dapat mengurangi pelanggaran dan meningkatkan hukum dan ketertiban (Santoso, 2021). Organisasi informal dapat berperan dalam meningkatkan kesadaran lingkungan dan praktik parkir ramah lingkungan, bahwa organisasi informal dapat membawa perubahan dengan meningkatkan kesadaran akan pentingnya pengelolaan parkir berkelanjutan (Lestari, 2023). Sinergi antara organisasi formal dan informal dapat menciptakan kebijakan yang lebih efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Menyoroti pentingnya kolaborasi untuk mencapai tujuan bersama dalam pengelolaan parkir (Rahmawati N. , 2022). Meskipun terdapat tantangan dalam hal peraturan dan kesadaran, organisasi informal mempunyai potensi besar untuk berkontribusi terhadap sistem pengelolaan parkir yang lebih baik. Menunjukan bahwa dengan dukungan yang tepat, organisasi informal dapat menjadi bagian penting dalam solusi pengelolaan parkir (Nugroho, 2023).

Tinjauan pustaka ini menunjukkan bahwa organisasi informal mempunyai peranan yang sangat penting dalam pengelolaan ruang parkir. Mereka tidak hanya berfungsi sebagai pelengkap organisasi formal, namun juga sebagai agen perubahan untuk meningkatkan efisiensi, keberlanjutan, dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan parkir. Meskipun terdapat tantangan seperti kurangnya kesadaran dan peraturan, organisasi formal dan informal dapat bekerja sama untuk menciptakan

sistem pengelolaan parkir yang lebih baik dan lebih tanggap terhadap kebutuhan masyarakat lokal.

F. Kerangka Teori

Teori *The State and Illegality* menurut Barbarra Harris White

Teori *The State and Illegality* yang dikemukakan oleh Barbara Harris-White mengeksplorasi hubungan antara negara dan ekonomi ilegal, dan bagaimana negara tidak hanya menjadi entitas yang mengatur dan menegakkan hukum, namun juga terlibat secara rumit dalam aktivitas ilegal. Pandangan Harris-White didasarkan pada studi menyeluruh tentang hubungan antara perekonomian informal, lembaga negara, dan berbagai bentuk ilegalitas. Barbara Harriss-White, seorang ekonom dan profesor emeritus studi pembangunan, tidak secara langsung terkait dengan teori "The State and Illegality in Indonesia" yang dikembangkan oleh Edward Aspinall dan Gerry van Klinken. Barbara Harris-White adalah seorang ekonom politik yang dikenal karena penelitiannya yang mendalam mengenai perekonomian informal, kemiskinan, dan negara di negara-negara berkembang.

Teorinya tentang negara dan ilegalitas muncul sebagai respons terhadap rumitnya hubungan kekuasaan antara negara dan ilegalitas, terutama dalam konteks negara berkembang di mana batasan antara hukum dan ilegalitas seringkali kabur. Harris-White terutama berfokus pada bagaimana negara secara aktif terlibat dalam kegiatan ilegal dengan berbagai cara. Ia berargumentasi bahwa bukan hanya individu dan organisasi swasta saja yang melakukan tindakan ilegal, namun negara dan pejabat mereka sering berperan dalam mendukung, mendukung, dan bahkan melaksanakan tindakan tersebut. Gagasan ini muncul dari pengamatan bahwa di banyak negara berkembang, hukum formal dan ilegalitas saling tumpang tindih, dan bahwa negara tidak selalu berfungsi sebagai lembaga yang bebas dari ilegalitas.

Pada buku *The State and Illegality* In Indonesia yang di tulis oleh Edward Aspinal dan Gerry Van Kliken (2011) teori Barbara Harris-White, *The State and Illegality* menyatakan bahwa negara tidak netral terhadap aktivitas ilegal, namun seringkali secara langsung atau tidak langsung terlibat dalam mendorong atau melegitimasi aktivitas ilegal. Ia menegaskan, negara mempunyai peran ganda sebagai lembaga penegak hukum formal dan sebagai aktor yang sering terlibat dalam pelanggaran hukum. Dalam konteks teori *The State and Illegality* oleh Barbara Harris-White, negara tidak hanya bertindak sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai aktor yang sering kali terlibat dalam aktivitas ilegal. Negara terlibat dalam dua cara utama:

1. Secara langsung, melalui partisipasi aktif pejabat dalam kegiatan yang melanggar hukum, seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme.
2. Secara tidak langsung, melalui kelalaian atau pembiaran terhadap aktivitas ilegal yang menguntungkan kelompok tertentu, baik di dalam maupun di luar pemerintahan.

Jika teori ini diterapkan pada konteks Indonesia, maka beberapa hal yang relevan dengan konsep *State and Illegality* dapat diidentifikasi:

1. Korupsi dan Negara Di Indonesia, korupsi di kalangan birokrat dan pejabat negara merupakan permasalahan yang meluas dan menjadi perhatian masyarakat. Dalam banyak kasus, korupsi ini mencerminkan keterlibatan negara dalam kegiatan ilegal. Pejabat publik seringkali menggunakan kekuasaan dan jabatannya untuk memperoleh keuntungan pribadi yang melanggar hukum. Misalnya, penyuapan, penggelapan, dan penggelapan dana publik seringkali melibatkan aktor-aktor di dalam negara.
2. Ambiguitas Hukum Barbara Harris-White menyoroti bagaimana ambiguitas dan duplikasi undang-undang memberikan peluang berkembangnya kegiatan ilegal. Di Indonesia, peraturan hukum tidak selalu jelas atau tidak ditegakkan

dengan baik, sehingga memberikan ruang bagi pihak berwenang dan pihak swasta untuk memanipulasi sistem. Hal ini misalnya terlihat dalam kasus izin pertambangan, dimana peraturan lingkungan hidup dan kepemilikan lahan sering diabaikan atau dilanggar oleh perusahaan yang berkonsultasi dengan otoritas pemerintah.

3. Perekonomian informal dan ilegalitas Perekonomian informal di Indonesia sangat besar, mulai dari sektor transportasi hingga perdagangan kaki lima. Perekonomian informal ini seringkali berada di wilayah abu-abu antara legal dan ilegal. Misalnya, banyak usaha kecil memberikan suap kepada pemerintah daerah untuk menghindari penutupan atau denda, meskipun mereka tidak terdaftar secara resmi. Dalam hal ini negara berperan sebagai perantara terhadap kegiatan-kegiatan yang secara teknis ilegal namun perkembangannya diperbolehkan secara efektif karena memberikan manfaat ekonomi.
4. Hubungan Patronase Harris-White juga berbicara tentang hubungan patronase di mana elit politik dan pejabat negara menjaga hubungan dekat dengan aktor yang terlibat dalam kegiatan ilegal. Di Indonesia, hubungan patronase ini terlihat pada oligarki dan jaringan politik yang melibatkan pengusaha dan kelompok elit dalam aktivitas ilegal seperti monopoli, eksploitasi sumber daya alam, dan penggelapan pajak.
5. Keterlibatan negara dalam tindakan ilegal terstruktur Selain contoh individu yang melakukan tindakan ilegal, negara juga dapat mendukung tindakan ilegal terstruktur. Misalnya, dalam kasus-kasus seperti pembalakan liar, penyelundupan narkoba, dan perdagangan manusia, otoritas negara dapat bekerja sama dengan penjahat atau mengambil keuntungan dari kegiatan-kegiatan tersebut. Negara tidak hanya gagal menegakkan hukum, namun justru berpartisipasi aktif dalam mendukung dan mengorganisir kegiatan ilegal.

Dengan menerapkan teori *The State and Illegality* Barbara Harris-White dalam konteks Indonesia, negara tidak selalu berfungsi sebagai penegak hukum semata,

namun sering kali memungkinkan atau memfasilitasi kegiatan-kegiatan ilegal. Telah terbukti bahwa negara mempunyai peran di dalam Di Indonesia, hal ini diwujudkan dalam korupsi birokrasi, hubungan patronase antara negara dan pelaku ekonomi, serta ambiguitas dalam penegakan hukum yang memungkinkan terus berlanjutnya aktivitas ilegal. Hal ini mengaburkan batas antara legal dan ilegal, dan negara menjadi terlibat di kedua sisi.

G. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Metode penelitian yang akan dipakai ialah metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Dimana menurut Sugiyono (2017) Pendekatan kualitatif adalah jenis penelitian yang menganalisis objek dengan memperhatikan kondisi alamiahnya. Dalam penelitian ini, objek yang diteliti tidak mengalami perubahan dari sebelum, selama, hingga setelah dilakukannya penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti berusaha untuk memahami perspektif subjek yang diteliti dan menggambarkan fenomena secara holistik dan deskriptif. Dengan pendekatan ini, peneliti dapat memberikan wawasan yang lebih kaya dan komprehensif terhadap objek yang diteliti.

Sedangkan untuk melakukan pendekatan penelitian peneliti menggunakan sebuah pendekatan studi kasus. Pendekatan studi kasus digunakan ketika seseorang atau peneliti ingin memahami secara mendalam suatu permasalahan atau situasi tertentu. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi kasus-kasus yang memberikan informasi yang kaya, di mana persoalan yang kompleks dapat dipelajari melalui beberapa contoh fenomena. Pendekatan studi kasus melibatkan pengumpulan data mendalam melalui metode seperti wawancara, observasi, atau analisis dokumen. Tujuannya adalah untuk memahami substansi masalah, faktor penyebab, dan konteks yang terkait dengan kasus tersebut. Dengan

menggunakan pendekatan ini, peneliti dapat memperoleh wawasan yang komprehensif tentang permasalahan atau situasi yang sedang diteliti (Assyakurrohim, 2023).

Dengan ini peneliti mengambil jenis penelitian yang dipakai ialah penelitian lapangan (field research). Jenis penelitian yang melibatkan pengumpulan data langsung dari tempat atau situasi di mana fenomena yang diteliti terjadi adalah penelitian lapangan. Dalam penelitian lapangan, peneliti secara aktif terlibat dalam mengamati, mengumpulkan data, dan berinteraksi dengan subjek penelitian di lingkungan asli mereka. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang fenomena yang sedang diteliti melalui observasi langsung dan interaksi dengan partisipan. Dalam penelitian lapangan, data dapat dikumpulkan melalui wawancara, observasi partisipan, pencatatan lapangan, atau pengamatan langsung terhadap peristiwa yang sedang terjadi (Septiani, 2022).

2. Sumber dan Jenis Data

Penelitian ini melibatkan dua jenis data yang berbeda, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer merujuk pada data utama yang dikumpulkan langsung dari sumber asli bahan kajian. Dalam hal ini, peneliti mengumpulkan data secara langsung melalui metode seperti wawancara, observasi, atau kuesioner. Data primer memberikan informasi langsung yang menjadi fokus utama penelitian.

Di sisi lain, data sekunder adalah data yang diperoleh dari pihak kedua atau ketiga. Data ini bisa berupa publikasi, laporan, jurnal, atau sumber data lain yang sudah ada. Data sekunder berperan sebagai informasi pelengkap yang mendukung data primer. Peneliti menggunakan data sekunder untuk melengkapi atau memperkaya pemahaman tentang fenomena yang sedang diteliti, serta membandingkan atau memvalidasi temuan dari data primer. Dengan menggabungkan data primer dan data sekunder, peneliti dapat

memperoleh pemahaman yang komprehensif dan mendalam tentang objek penelitian. Data primer memberikan informasi utama yang dikumpulkan langsung, sementara data sekunder memberikan informasi tambahan dari sumber lain yang melengkapi analisis dan pemahaman secara keseluruhan.

Penelitian ini mengumpulkan data primer dari Dinas Perhubungan Kota Semarang yang menjadi fokus utama penelitian terhadap peran organisasi informal dalam pengelolaan parkir tersebut. Selain itu, data dikumpulkan dari masyarakat sekitar yang terkait dengan subjek penelitian. Sedangkan perolehan data sekunder meliputi pengumpulan informasi dari beberapa literatur, antara lain makalah, buku, jurnal terdahulu, serta media cetak dan elektronik atau webset yang berkaitan dengan topik penelitian yaitu partisipasi masyarakat.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan teknik yang dijadikan alat oleh peneliti untuk mengumpulkan data yang diperoleh agar memvalidasi penelitian terkait, teknik pengumpulan data utama berupa observasi, wawancara formal dan informal, serta dokumen. Dengan menggunakan teknik ini, peneliti dapat memperoleh pemahaman yang mendalam tentang peran organisasi informal dalam pengelolaan parkir tepi jalan. Peneliti dapat memperoleh data yang valid tentang peran organisasi informal dalam pengelolaan parkir tepi jalan (Nasution, 2023).

a. Observasi

Observasi adalah teknik dalam metode penelitian yang melibatkan peneliti secara aktif dalam situasi atau konteks yang diamati untuk memahami fenomena dengan lebih mendalam. Dalam observasi, peneliti mengamati perilaku, interaksi, dan pola komunikasi yang terjadi secara langsung tanpa melibatkan interpretasi dari pihak lain. Observasi dapat dilakukan dalam berbagai jenis penelitian dan memberikan kesempatan bagi peneliti

untuk mendapatkan data yang valid dan wawasan yang lebih kaya tentang fenomena yang diteliti.

b. Wawancara Formal dan Non-Formal

Wawancara formal dan non-formal adalah dua pendekatan yang berbeda dalam metode penelitian kualitatif. Wawancara formal dilakukan dengan menggunakan pedoman wawancara yang telah disusun sebelumnya, sedangkan wawancara non-formal lebih fleksibel dan tidak terstruktur. Keduanya melibatkan interaksi langsung antara peneliti dan responden untuk mengumpulkan data yang mendalam dan konteks yang lebih kaya. Wawancara formal lebih terstruktur dan memiliki pertanyaan yang telah dirancang sebelumnya, sementara wawancara non-formal lebih spontan dan mengikuti alur percakapan yang alami. Dalam kedua pendekatan ini, penting bagi peneliti untuk mendengarkan dengan cermat, membuat catatan yang akurat, dan membangun hubungan yang baik dengan responden.

c. Dokumen

Dalam penelitian kualitatif, penggunaan dokumen sebagai sumber data umum dilakukan. Dokumen dapat berupa berbagai jenis, seperti arsip, laporan, catatan, surat, jurnal, dan media sosial. Setiap dokumen memiliki karakteristik yang berbeda, termasuk format, konteks, dan tujuan pembuatannya. Penggunaan dokumen memungkinkan peneliti mendapatkan informasi yang telah ada sebelumnya, yang dapat digunakan untuk analisis dan interpretasi. Namun, peneliti perlu melakukan analisis kritis terhadap keabsahan, keandalan, dan relevansi dokumen tersebut. Penggunaan dokumen sebagai sumber data melengkapi data dari metode lain dan memberikan perspektif yang beragam dalam penelitian kualitatif.

4. Teknik Analisis Data

Setelah mengumpulkan data melalui observasi dan wawancara, langkah selanjutnya dalam penelitian adalah analisis data. Analisis data bertujuan untuk memahami, mengorganisir, dan menginterpretasikan data yang telah diperoleh. Proses analisis melibatkan pengkodean, kategorisasi, pencarian pola, dan interpretasi data. Penting bagi peneliti untuk menjaga keobjektifan dan akurasi dalam analisis data. Dengan melakukan analisis data yang cermat, peneliti dapat menghasilkan temuan yang relevan dan menyajikan hasil penelitian yang bermakna (Saleh, 2017)

Peneliti menggunakan teknik analisis data model Miles dan Huberman (1994) yang sudah dipakai oleh beberapa peneliti dahulu, teknik ini dibagi menjadi tiga kegiatan analisis, ketiga hal tersebut adalah sebagai berikut:

a. Reduksi Data

Reduksi data ialah proses penting dalam penelitian yang melibatkan penyederhanaan dan pengorganisasian data yang kompleks. Tujuannya adalah untuk fokus pada aspek-aspek yang paling penting dan relevan dari data yang dikumpulkan. Melalui reduksi data, peneliti dapat menghindari kelebihan informasi dan menghasilkan analisis yang lebih terarah. Hal ini membantu memperoleh pemahaman yang lebih dalam tentang isu yang diteliti. Dalam keseluruhan, reduksi data memungkinkan peneliti untuk mengelola dan menginterpretasi data dengan lebih efektif.

b. Penyajian Data

Penyajian data dalam penelitian kualitatif adalah proses komunikasi temuan atau hasil analisis kepada pembaca. Tujuannya adalah untuk menjelaskan temuan secara jelas, sistematis, dan komprehensif agar dapat dipahami dengan baik. Peneliti menggunakan berbagai metode penyajian seperti kutipan, narasi, tabel, grafik, dan teknik visual untuk memperkuat pemahaman. Penting bagi peneliti

untuk memastikan keakuratan dan keobjektifan data yang disajikan, serta mempertimbangkan audiens yang dituju. Penyajian data memainkan peran penting dalam menyampaikan kontribusi yang berarti dalam penelitian.

c. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan proses tahap akhir dalam proses penelitian di mana peneliti membuat inferensi berdasarkan analisis data dan temuan yang dikumpulkan. Ini penting karena kesimpulan menentukan signifikansi dan implikasi penelitian. Peneliti menganalisis data dengan cermat untuk mengidentifikasi pola dan hubungan, dan kesimpulan harus didasarkan pada bukti yang ada. Kesimpulan dapat memberikan wawasan baru, mendukung atau menolak teori, atau memberikan rekomendasi untuk tindakan selanjutnya.

H. Sistematika Penelitian

Pada sistematika penulisan peneliti akan menjelaskan bagaimana penulisan tugas akhir, yaitu sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Pada bab satu ini akan dijelaskan secara detail terkait isi dari pendahuluan sebagai intro yang antara lain latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Dalam pendahuluan juga dipaparkan tinjauan pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan jenis pendekatan digunakan untuk menghindari berbagai simulasi penelitian serupa. Pada bagian terakhir bab ini dijelaskan penyusunan penulisan secara sistematis yang nanti menjadi kesatuan skripsi utuh.

BAB II: TEORI THE STATE AND ILLEGALITY

Pada bab dua ini penulis akan menjelaskan dan memaparkan State and Illegality sebagai rujukan dalam penelitian penulisan skripsi secara global. Penjelasan teori ini digunakan agar dapat memperikan pemahaman secara menyeluruh dan digunakan sebagai kerangka berfikir dalam penelitian yang dikaji.

BAB III: GAMBARAN UMUM KOTA SEMARANG

Dalam bab ini akan menjabarkan gambaran umum mengenai Kota Semarang yang menjadi objek penelitian diantaranya:

- a. Sejarah Kota Semarang, Kondisi Geografis, Kondisi Demografis, Kondisi Sosial Budaya, dan Kondisi Ekonomi
- b. Dinamika fenomena kasus penelitian

BAB IV: BAGAIMANA PERAN PEMUDA PANCASILA DALAM PENGELOLAAN PARKIR TEPI JALAN

Pada bab ini akan dijelaskan secara mendetail tentang sejauh mana peran Pemuda Pancasila dalam pengelolaan parkir liar di tepi jalan.

BAB V: APA DAMAPAK DARI PERAN PEMUDA PANCASILA DALAM PENGELOLAAN PARKIR KEPADA MASYARAKAT SEKITAR

Dalam bab ini akan dijelaskan secara detail tentang dampak dari peran Pemuda Pancasila dalam pengelolaan parkir kepada masyarakat.

BAB VI: PENUTUP

Bab ini merupakan bagian penting dalam sebuah penelitian yang berfungsi untuk menyajikan hasil akhir dan kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan. Pada bab ini, penulis akan menyajikan temuan utama yang dihasilkan dari analisis data yang telah dilakukan serta memberikan jawaban terhadap

rumusan masalah yang diajukan pada awal penelitian penelitian. Dalam ini akan ada saran dari penulis untuk Pemuda Pancasila dalam pengelolaan parkir tepi jalan.

BAB II

KAJIAN TEORI

Beberapa teori yang digunakan dalam penelitian ini dipilih berdasarkan relevansi dengan judul penelitian.

A. Parkir Tepi Jalan

Parkir tepi jalan, juga dikenal sebagai "*on street parking*," adalah fasilitas parkir yang menggunakan tepi atau pinggir badan jalan. Konsep ini sering diterapkan di kawasan perumahan, area komersial, serta pusat-pusat perkotaan untuk memberikan akses langsung kepada pengguna kendaraan. Secara umum, parkir tepi jalan memiliki dua bentuk utama: parkir paralel dan parkir serong atau tegak lurus, tergantung pada tata letak jalan dan kebijakan lalu lintas setempat. Berikut adalah istilah dan konsep dasar parkir tepi jalan secara detail:

1. Konsep Dasar

Menurut Hobbs (1995) Parkir diartikan sebagai suatu kegiatan untuk meletakkan atau menyimpan kendaraan di suatu tempat tertentu yang lamanya sesuai tergantung kepada selesainya keperluan dari pengendara tersebut. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah parkir adalah menghentikan atau menaruh kendaraan bermotor untuk beberapa saat ditempat yang sudah disediakan. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang bersifat sementara karena di tinggalkan pemiliknya.

Tujuan utama parkir adalah agar lokasi parkir sedekat mungkin dengan lokasi perjalanan, karena apabila parkir terlalu jauh dari tujuan, maka orang tersebut akan berpikir beralih ke tempat lain. Untuk itu sejumlah ruang parkir yang cukup memadai harus disediakan di lokasi-lokasi yang berdekatan dengan tujuan

perjalanan (Anggraini dan Syaiful, 2013). Kebutuhan tempat parkir untuk kendaraan baik kendaraan pribadi, angkutan umum, sepeda motor, maupun truk adalah sangat penting. Kebutuhan tempat parkir tersebut tergantung dari bentuk dan karakteristik masing-masing kendaraan dengan desain dan lokasi parkir.

Namun konsep dari parkir tepi jalan merujuk pada kegiatan memarkir kendaraan di sepanjang sisi jalan, baik di jalur peruntukan bagi parkir maupun di area yang diizinkan oleh peraturan lalu lintas setempat. Pada perencanaan jalan yang sisinya digunakan untuk parkir juga diperlakukan diperhatikan antara pemisahan antara tempat parkir kendaraan pribadi, kendaraan umum maupun kendaraan yang akan melakukan bongkar muat barang. Kesemuanya ini harus memperhatikan kondisi jalan dan lingkungan, kondisi lalu-lintas, aspek keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas.

2. Jenis-jenis parkir

Menurut penempatannya dari pedoman teknis penyelenggaraan fasilitas parkir (1998), parkir dibagi menjadi dua jenis parkir, yaitu:

- Parkir di badan jalan (*On Street Parking*)

Parkir di badan jalan atau sering disebut sebagai tepi jalan, dilakukan di atas badan jalan dengan menggunakan sebagian badan jalan. Walaupun parkir jenis ini banyak diminati, tetapi akan menimbulkan kerugian bagi pengguna transportasi yang lain. Hal ini disebabkan karena, parkir memanfaatkan badan jalan, mengurangi lebar manfaat jalan, dan akhirnya akan menimbulkan gangguan pada fungsi jalan tersebut. Walaupun hanya beberapa kendaraan saja yang parkir di badan jalan, tetapi kendaraan tersebut secara efektif telah mengurangi badan jalan. Kendaraan yang parkir di tepi jalan

memiliki faktor utama dari 50% kecelakaan terjadi di tengah ruas jalan, di daerah pertokoan. Hal ini tentu disebabkan karena kurangnya kebebasan pandangan, kendaraan berhenti dan atau keluar dari tempat parkir di depan kendaraan-kendaraan yang lewat secara mendadak.

b. Parkir di luar badan jalan (*Off Street Parking*)

Parkir di luar badan jalan (*off street parking*), yaitu parkir yang lokasi penempatan kendaraannya tidak berada di badan jalan. Sistem parkir ini dapat berupa pelataran/taman parkir, bangunan, dan bangunan bertingkat khusus parkir. Secara ideal lokasi yang dibutuhkan untuk parkir di luar badan jalan (*off street parking*), harus dibangun tidak terlalu jauh dari tempat yang dituju oleh pemarkir. Jarak parkir terjauh ke tempat tujuan tidak lebih dari 300 hingga 400 meter. Bisa lebih dari itu, pemarkir akan mencari tempat parkir lain karena merasa keberatan untuk berjalan jauh (Warpani, 1990).



a. Parkir di tepi jalan (*on street parking*) b. Parkir di luar jalan (*off street parking*)

Gambar 2. 1 Jenis-jenis Parkir

Sumber: Google

B. Organisasi Informal dalam Tata Kelola Parkir

Organisasi ada dua yaitu formal dan Informal. Organisasi formal adalah kumpulan dari dua orang atau lebih yang mengikatkan diri dengan suatu tujuan bersama secara sadar serta dengan hubungan kerja yang rasional. Sedangkan organisasi informal adalah kumpulan dan dua orang atau lebih yang terlibat pada suatu aktivitas serta tujuan bersama yang tidak disadari. Organisasi informal dapat disebut sebagai suatu ‘bayangan’ organisasi formal. Namun menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia organisasi informal dapat diartikan sebagai kelompok yang dibentuk atas dasar persahabatan atau tujuan bersama yang tidak terkait dengan pekerjaan.

Organisasi informal dalam mengelola tata letak parkir merujuk pada struktur atau kelompok yang tidak resmi yang berkembang secara alami di lingkungan parkir, terutama di area yang tidak diatur ketat oleh pemerintah atau instansi terkait. Hal ini muncul dari kebutuhan praktis masyarakat dalam situasi di mana regulasi formal kurang atau tidak mencukupi. Mereka menciptakan sistem yang didasarkan pada pemahaman lokal, hubungan sosial, dan pengetahuan praktis tentang penggunaan ruang. Meskipun tidak sah secara hukum, organisasi ini sering memainkan peran penting dalam mengurangi kekacauan dan membantu menjaga keteraturan di area dengan permintaan parkir tinggi.

Menurut Rahmah (2016) Pengelolaan parkir di dalam badan jalan (*on street parking*) merupakan hal penting untuk mengendalikan lalu lintas agar kemacetan dapat ditekan. Berikut proses manajemen parkir yang dijalankan meliputi:

1. Perencanaan

Adapun pengelolaan dalam tahap awal ini adalah mengidentifikasi kebutuhan parkir di area tertentu. Hal ini mencakup analisis jumlah kendaraan, tipe pengguna dan tingkat

permintaan parkir di lokasi tersebut. Merancang tata letak parkir tepi jalan, sesuai dengan jalur lebar jalan dan kebutuhan lalu lintas. Kapasitas parkir juga harus disesuaikan dengan jumlah kendaraan yang sering menggunakan area tersebut.

2. Regulasi dan kebijakan parkir

Organisasi setempat perlu menetapkan aturan-aturan yang mengatur durasi parkir, waktu parkir yang diizinkan, serta batasan zona parkir. Parkir tepi jalan berbayar, penting untuk menentukan tarif parkir yang sesuai, yang dapat berfungsi sebagai alat pengendalian untuk mengurangi penggunaan parkir yang berlebihan.

3. Pemantauan dan Evaluasi

Data tentang penggunaan parkir seperti tingkat hunian, durasi parkir rata-rata, dan jumlah pelanggaran perlu dikumpulkan secara berkala untuk mengevaluasi efektivitas manajemen parkir. Pengumpulan data bisa dilakukan secara manual oleh petugas atau melalui teknologi sensor parkir. Berdasarkan data yang terkumpul, otoritas perlu mengevaluasi apakah peraturan parkir yang ada sudah sesuai atau perlu disesuaikan.

4. Pengendalian dampak terhadap lalu lintas

Parkir tepi jalan dapat mempengaruhi kelancaran arus lalu lintas, terutama di jalan-jalan yang padat. Oleh karena itu, penting untuk merancang tata letak parkir dan mengatur kapan dan di mana parkir tepi jalan diperbolehkan agar tidak menyebabkan kemacetan.

5. Sosialisasi dan edukasi

Penting untuk memberikan edukasi kepada pengemudi tentang aturan parkir, cara menggunakan meteran parkir, serta konsekuensi dari pelanggaran aturan parkir. Menyadarkan masyarakat tentang pentingnya parkir yang tertib dan dampak buruk parkir

sembarangan terhadap lalu lintas dan lingkungan adalah bagian dari manajemen parkir yang sukses.

Proses manajemen parkir tepi jalan melibatkan perencanaan yang matang, regulasi yang ketat, pengawasan yang efektif, dan penggunaan teknologi untuk memastikan penggunaan ruang parkir yang efisien dan tertib. Manajemen yang baik juga mempertimbangkan keseimbangan antara kebutuhan parkir dan kelancaran lalu lintas, serta penegakan aturan yang konsisten untuk menciptakan kenyamanan bagi pengguna jalan.

C. Teori State and Illegality

Penulis menguraikan secara cermat kerangka teori yang berfungsi sebagai pedoman utama dalam menganalisis jawaban atas pertanyaan penelitian dan sebagai alat untuk menganalisis masalah yang menjadi fokus penelitian ini. Pada tahap ini, penulis memperkenalkan konsep-konsep kunci yang menjadi landasan teori untuk pemahaman mendalam tentang fenomena yang diteliti. Landasan teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori *Statte and Illegality* dikembangkan oleh Barbara Harris White dalam buku karya Gary Van Klinken. Pemilihan teori ini tidak lepas dari pertimbangan yang matang. Teori ini dipilih karena kemampuannya dalam menganalisis aktivitas ilegal yang sering kali menjadi ciri aktivitas yang relevan dengan penelitian ini. Teori negara dan ilegalitas digunakan sebagai kerangka analisis untuk membaca aktivitas ilegal para aktor yang terlibat dalam pengelolaan parkir tepi jalan di Jalan Prof. Dr. Hamka Ngaliyan Kota Semarang. Oleh karena itu, bab kedua ini tidak hanya menjadi jembatan antara kerangka teori dan implementasinya dalam penelitian, namun juga menjadi panduan komprehensif bagi pembaca untuk memahami landasan konseptual dan metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini. Penjelasan teori ini dirinci pada pembahasan berikut:

a. Konsep Teori *State and Illegality*

State and illegality merupakan tindakan ilegal yang dilakukan oleh aktor-aktor negara yang berhubungan dengan negara, dan harus dilihat sebagai bagian dari fungsi negara dan bukan sebagai pelanggaran terhadap fungsi normal negara. Pandangan ini diungkapkan oleh Aspinall dan Van Klinken yang melihatnya dari perspektif nasional (Aspinall, Gerry Van Klinken, Edwards, 2011). Negara dan ilegalitas tidak dapat dipisahkan. Negara, sebagai organisasi yang memiliki kendali dan wewenang, dapat melakukan berbagai aktivitas legal dan ilegal. Ilegal mengacu pada perbuatan manusia dengan kegiatan yang dianggap ilegal (illegal) atau halal (legal). Hal ini merupakan pembatasan terhadap perilaku setiap individu dalam masyarakat. Pada umumnya perbuatan melawan hukum hanya dapat dilakukan oleh kelompok untuk kepentingan pribadi. Individu atau kelompok yang terlibat dalam aktivitas ilegal biasanya memiliki akses pada level tertinggi untuk melakukan aktivitas ilegalnya.

Teori negara dan ilegalitas yang dikembangkan oleh Barbara Harris-White berfokus pada hubungan antara negara dan ilegalitas, khususnya dalam konteks negara berkembang. Kerangka teori Barbara Harris-White mengenai negara dan ilegalitas mencakup diskusi tentang bagaimana negara sering kali terlibat dalam tindakan yang mendukung atau mempertahankan ilegalitas, dibandingkan bertindak sebagai institusi yang mengatur legalitas. Teori ini menekankan bahwa negara tidak hanya terdiri dari institusi formal, namun juga mencakup jaringan informal yang memungkinkan terjadinya aktivitas ilegal dan korupsi. Negara dipandang sebagai aktor kompleks yang terlibat dalam perekonomian informal dan kegiatan ilegal, bukan sebagai entitas terpisah atau satu-satunya aktor yang mencegah kegiatan ilegal.

Teori negara dan ilegalitas membedakan antara ilegalitas internal dan eksternal. Ilegalitas eksternal cenderung menganggap bahwa tindakan yang berasal dari negara adalah ilegal, seperti pelanggaran hak asasi manusia. Sebaliknya,

illegalitas internal melibatkan upaya aktor internal untuk menolak mekanisme tanggung jawab eksternal yang berlaku.

b. Latar Belakang munculnya *Illegality*

Munculnya negara dan illegalitas disebabkan oleh kemampuan negara dalam menyembunyikan perbuatan melawan hukum tersebut. Kegiatan ilegal ini ditutup-tutupi demi kelangsungan operasinya. Pelaku tindakan ilegal memiliki insentif yang kuat untuk merahasiakan tindakan mereka karena takut akan hukuman dan kemungkinan masalah sosial. Perbuatan ilegal yang terjadi seringkali melibatkan aktor negara sehingga menyulitkan identifikasi. Hal ini karena negara pada dasarnya diatur dan didisiplinkan, dan partisipasi aktor-aktor negara cenderung terencana, kolektif, terorganisir, dan kolaboratif. Kegiatan ilegal telah berkembang seiring berjalannya waktu dan dipengaruhi oleh perkembangan. Mereka yang berkuasa mencoba merancang strategi untuk memastikan bahwa kegiatan ilegal yang mereka lakukan berjalan lancar dan menguntungkan mereka. Penguasaan terhadap sektor ekonomi dan pemerintahan menjadi sumber pendapatan bagi aktor-aktor yang terlibat dan mempengaruhi kekuasaan elit penguasa.

Aspinal (2011) Tujuan bukunya adalah untuk mengubah persepsi masyarakat terhadap orang-orang yang berkuasa, seperti pegawai negeri sipil, militer, dan tokoh berpengaruh lainnya, terkait dengan perbuatan melawan hukum yang sudah atau sedang berlangsung. Tujuan dari teori ini adalah untuk memberantas kegiatan ilegal khususnya korupsi yang masih menjadi permasalahan. Illegalitas sering dikaitkan dengan penyalahgunaan kekuasaan untuk mendapatkan keuntungan ilegal. Di Indonesia, aktivitas ilegal terjadi di berbagai tingkatan, mulai dari skala kecil hingga besar, dengan melibatkan pihak berwenang. Misalnya, di sekolah, pungutan liar dilakukan terhadap orang tua siswa oleh guru dan kepala sekolah tanpa pemberitahuan resmi. Dalam beberapa kasus, petugas imigrasi menjual dokumen perjalanan palsu untuk keperluan imigrasi. Meski kegiatan ini meresahkan masyarakat, namun

sulit untuk dihindari. Dalam kasus-kasus yang lebih besar, seperti korupsi pejabat yang terlibat dalam kegiatan kriminal tingkat tinggi seperti pemerasan, penyelundupan, pembalakan liar, dan perdagangan narkoba, penegak hukum dan personel militer mungkin dilibatkan untuk memfasilitasi penerapan tindakan-tindakan tersebut.

Tujuan utama dalam buku Aspinall (2011) ialah memberikan komentar dan analisis berdimensi moral terkait fenomena yang terus melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Gerakan reformasi tahun 1998 yang mempopulerkan dan menggulingkan rezim Orde Baru yang dipimpin oleh Presiden Suharto secara khusus menekankan pentingnya mengakhiri tindakan ilegal yang dilakukan pejabat negara, seperti pelanggaran hak asasi manusia militer dan kebijakan investasi nepotis. Gerakan tersebut muncul sebagai respons besar terhadap suara-suara yang mengutuk tindakan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), sebuah istilah yang terus diperdebatkan di ranah politik publik hingga saat ini.

Buku ini juga bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang keberadaan dan masih adanya korupsi dan kegiatan ilegal lainnya yang dilakukan pejabat negara. Seperti yang diberitakan secara luas, korupsi dan ilegalitas telah menjadi bagian dari budaya Indonesia. Oleh karena itu, dengan membaca buku ini, Anda akan dapat melihat bagaimana pertanyaan-pertanyaan mengenai hakikat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh penyelenggara negara memberikan pencerahan terhadap hakikat negara itu sendiri.

Dalam bukunya, Aspinall (2011) juga memberikan pembelajaran bagaimana mendapatkan informasi yang benar dari para whistleblower. Hal ini penting karena jika menyangkut kasus dan persoalan yang melibatkan tindak pidana, seringkali sulit mendapatkan informasi dari pihak yang memberi informasi. Pendekatan yang diajarkan Aspinall adalah menjaga dan

menjamin kerahasiaan informan agar mereka merasa nyaman dalam memberikan informasi.

Dalam fenomena aktivitas ilegal yang sering terjadi, aktor atau elit negara berjejaring dalam jaringan nasional. Namun, para elit ini juga dapat menciptakan batasan yang memisahkan lembaga publik dari masyarakat. Keterhubungan sosial dengan aktivitas ilegal di Indonesia menjadi salah satu cara untuk mengatasi korupsi. Aktivitas ilegal muncul karena berbagai faktor, antara lain pemerasan, organisasi masyarakat, dukungan pihak berwenang, ketatnya persaingan di pasar, dan keterlibatan orang yang mencari keuntungan atau pemerasan.

Hampir di seluruh Indonesia, seperti di negara lain, keterlibatan pejabat pemerintah dalam kegiatan ilegal di seluruh Indonesia sudah diketahui dan dipublikasikan secara luas. Skandal besar yang menarik perhatian publik adalah ketika muncul bukti bahwa pejabat pemerintah telah mencuri uang dari kas pemerintah, mengadakan kontrak curang dengan pengusaha swasta, atau mencuri uang dari pengusaha swasta. Hal ini sering terjadi di tingkat tertinggi pemerintahan. Dalam banyak kasus, motivasi di balik kegiatan ilegal tersebut tampaknya adalah mengejar kepentingan pribadi dan kepentingan pribadi.

Seperti yang dijelaskan Markus Mietzner dalam bagianya mengenai pemilu, banyak politisi, pengusaha, dan pencari keuntungan mengabaikan hukum dan berharap tidak ada yang memperhatikan atau peduli. Dalam beberapa kasus, sikap apatis masyarakat terhadap politik dapat menyebabkan mereka bersikap pasif terhadap aktivitas yang dapat merugikan mereka. Masyarakat terbiasa dengan sistem di mana setiap orang tahu bahwa tindakan ilegal secara formal tidak akan dihukum. Tindakan ilegal yang dilakukan oleh negara mungkin kurang diperhatikan dan diakui secara sosial, namun tindakan ilegal tersebut masih terjadi di banyak tempat dan dilakukan secara terbuka.

Upaya reformasi yang dilakukan otoritas negara untuk memberantas korupsi dan kegiatan ilegal belum mencapai hasil yang diharapkan. Meskipun

banyak peraturan antikorupsi telah diterapkan, pembentukan lembaga-lembaga baru, penetapan standar akuntabilitas bagi anggota parlemen terpilih dan lembaga eksekutif, serta penangkapan pejabat tinggi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Indonesia masih tetap melakukan hal yang sama menunjukkan kemajuan yang lambat dalam pemeringkatan korupsi internasional.

Secara umum, tingkat kerahasiaan cenderung meningkat seiring dengan meningkatnya pelanggaran dan aktivitas ilegal. Hal ini berkaitan dengan tingkat risiko dan kemungkinan hukuman. Menyelidiki kasus-kasus korupsi kecil lebih mudah daripada menyelidiki korupsi yang serius, dan menyelidiki aktivitas seperti penyelundupan barang di tempat umum (misalnya perdagangan manusia di perbatasan Thailand-Burma) sangatlah sulit (misalnya penyelundupan narkoba melalui bandara). Terakhir, dan hal ini menjadi fokus khusus buku ini, tindakan ilegal yang melibatkan pejabat negara hampir selalu sulit untuk diselidiki. Hal ini karena negara-negara modern mengandalkan gagasan terikat oleh aturan dan organisasi yang disiplin. Oleh karena itu, terlepas dari tingkat keterlibatan pejabat negara dalam korupsi atau kegiatan ilegal lainnya, pejabat negara pada umumnya enggan mengakuinya secara terbuka.

Situasi ini menyulitkan dan berpotensi membahayakan bagi para peneliti dan pihak yang mendukung mereka untuk menyelidiki secara langsung aktivitas ilegal. Jurnalis investigasi dan peneliti yang menyelidiki kejahatan terorganisir di beberapa negara juga terbunuh. Nasib serupa juga dialami oleh beberapa jurnalis Indonesia yang mengusut kasus korupsi. Banyak orang lainnya mengalami bentuk kekerasan yang tidak mematikan atau mengancam. Masalah umum lainnya adalah sulitnya memperoleh informasi. Kita dihadapkan pada rasa frustrasi terhadap tembok ketiadaan dan kesadaran bahwa aktivitas ilegal tertentu memang ada, namun tak seorang pun mau mengakui keberadaannya kecuali secara umum. Oleh karena itu, tidak

mengherankan jika banyak literatur mengenai ilegalitas pada akhirnya bergantung pada data yang diperoleh dari lembaga penegak hukum atau sumber yang tidak diketahui.

c. Bentuk-bentuk *illegality*

Ilegalitas merembes ke berbagai lapisan masyarakat dalam berbagai bentuk, menciptakan pola perilaku yang merugikan dan ilegal. Salah satu contohnya adalah di lingkungan pendidikan, di mana banyak guru sekolah dasar miskin terlibat dalam praktik ilegal memungut biaya sekolah tidak resmi kepada orang tua dan siswa. Langkah-langkah ini tidak hanya menimbulkan kerugian finansial bagi para orang tua yang sudah mengalami kesulitan, namun juga menyebabkan ketimpangan akses terhadap pendidikan.

Selain itu, fenomena pungli polisi juga bermunculan di bidang penegakan hukum. Beberapa petugas polisi menggunakan posisi mereka untuk menuntut agar tersangka menyerahkan uang atau layanan seksual tanpa proses hukum. Praktik ini menanamkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan dan membawa sistem hukum ke arah yang tidak etis.

Di wilayah Kepulauan Riau, petugas imigrasi yang seharusnya memberikan bantuan justru terlibat dalam aktivitas ilegal. Mereka menjual dokumen perjalanan asli dan palsu, sehingga menciptakan celah bagi pelanggaran perbatasan dan keamanan nasional. Hal ini merusak citra pelayanan publik yang mengutamakan kepentingan dan keselamatan masyarakat setempat. Tindak pidana juga merambah di lingkungan birokrasi dan pemerintahan. Pejabat tinggi sering terlibat dalam kegiatan ilegal seperti pemerasan, penyelundupan, pembalakan liar, dan perdagangan narkoba. Meskipun keterlibatan mereka seringkali terjadi dalam kerangka kerja sama dengan organisasi besar, hubungan yang tidak jelas antara aparat penegak hukum dan pejabat berkontribusi pada kurangnya transparansi dalam penegakan hukum. Kolusi dalam penyelesaian kontrak pembangunan negara juga menjadi masalah serius. Terdapat perjanjian kerja sama antara kepolisian

setempat dan organisasi kriminal setempat mengenai penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan pribadi. Dampaknya juga tercermin pada pembangunan infrastruktur yang tidak jelas dan berdampak buruk bagi masyarakat.

Ada juga penjelasan dalam bab oleh Harriss-White pandangan ini, yang menyatakan bahwa korupsi adalah bagian dari sistem yang disponsori elit untuk menopang kekuasaan dan mengalihkan perhatian dari keterlibatan rezim dalam praktik ilegal, telah dimasukkan ke dalam analisis yang berfokus pada gagasan 'negara bayangan' – sebuah konsep yang menggambarkan bagian negara yang berada di luar struktur negara formal, di mana otoritas politik diambil dari kemampuan mengendalikan perekonomian informal.

d. Aktor-Aktor

Aktivitas ilegal yang terjadi di Indonesia sudah membudaya dan menjadi kebiasaan buruk yang sulit dihindari atau diberantas. Sebab, para pelaku perbuatan melawan hukum menyembunyikan perbuatan melawan hukumnya sehingga perbuatan tersebut tetap dilakukan. Oleh karena itu, dengan teori ini akan memaparkan aktivitas ilegal yang umum terjadi di Indonesia dan mencoba memberikan pemahaman kepada pembaca untuk mengetahui lebih jauh permasalahan yang muncul sehingga masyarakat dapat mempelajari aktivitas ilegal tersebut. Dalam praktik perbuatan melawan hukum, aktor mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap jalannya kegiatan, dan teori ini mencakup pendidik, penegak hukum, pencari rente, aparat kepolisian, aparat militer, organisasi masyarakat, masyarakat sipil, dan pengusaha sebagai aktor yang terlibat. Bahkan pejabat negara-negara tersebut pun melakukan tindakan ilegal tersebut.

Dalam konteks teori "negara dan ilegalitas", aktor-aktor yang terlibat dalam fenomena ilegalitas dan korupsi di suatu negara seperti Indonesia dapat dibagi menjadi beberapa kategori. Di bawah ini adalah penjelasan rinci tentang aktor-aktor tersebut:

4.1. Aktor Politik Lokal

- Peran dalam illegalitas: Aktor politik lokal seringkali terlibat dalam upaya mempertahankan dan mempromosikan tindakan ilegal. Aktor politik lokal juga sering terlibat dalam kolusi dan korupsi, mereka dapat menggunakan posisinya untuk mendorong kegiatan ilegal dan mengeksplorasi sumberdaya nasional demi keuntungan individu atau kelompok. Aktor politik lokal juga memiliki legitimasi dan kontrol sosial yang kuat dalam komunitas lokal. Mereka sering dipandang sebagai “pembangkit tenaga listrik lokal” yang menyediakan layanan yang memenuhi kebutuhan dasar dan permintaan penduduk (Rahmawati, 2015).
- Struktur dan Organisasi: Para aktor politik lokal ini seringkali beroprasi dalam struktur yang terstruktur dan diwariskan, menghubungkan banyak kelompok kepentingan dan berkerja secara sistematis untuk mempertahankan banyak kelompok kepentingan dan berkerja secara sistematis untuk mempertahankan kebijakan yang tidak sesuai dengan kepentingan mereka. Aktor politik lokal sering menggunakan ``strategi bertahan hidup'' yang mencakup kontrol sosial dan bantuan pribadi terhadap klien mereka. Hal ini membantu mereka mempertahankan kekuasaan dan kontrol sosial di wilayah tersebut (Savirani, 2014).

4.2. Pejabat Negara

Dalam konteks teori *State and Illegality* Barbara Harris-White, pejabat negara berfungsi sebagai aktor kunci dalam memperkuat hubungan antara negara dan ilegalitas. Melalui kolusi, manipulasi politik, dan penyalahgunaan kekuasaan, mereka menciptakan

struktur yang tidak hanya mendorong praktik korupsi namun juga memungkinkan terjadinya eksplorasi sosial dan ekonomi dalam masyarakat.

4.3. Masyarakat dan Kelompok Sosial

Masyarakat seringkali memandang kegiatan korupsi dan ilegal sebagai hal biasa. Perilaku korupsi sering kali dipandang sebagai cara sah untuk mengakses layanan dan sumber daya yang seharusnya tersedia secara legal. Masyarakat, khususnya di tingkat lokal, sering kali terjebak dalam jaringan informal yang beroperasi di luar hukum. Hal ini menciptakan hubungan yang saling menguntungkan antara individu dan pejabat publik dimana kedua belah pihak mendapatkan keuntungan dari aktivitas ilegal (Hidayat, 2015).

Menurut Harriss White, Kelompok sosial dibentuk oleh individu-individu yang saling berinteraksi dan mempengaruhi. Kelompok ini bisa saja terdiri dari orang-orang yang mempunyai kesamaan baik dari segi nilai dan norma geografis maupun budaya (Kandioh, 2016).

4.4. Institusi dan Lembaga

Institusi dan lembaga dibahas dalam konteks bagaimana mereka beroperasi di dalam masyarakat dan berinteraksi dengan praktik ilegal. Menurut White, Institusi adalah struktur sosial yang mengatur perilaku individu dan kelompok dalam masyarakat. Ini mencakup norma, aturan, dan konvensi yang membentuk interaksi sosial. Sebaliknya, institusi mengacu pada organisasi atau unit formal yang menjalankan fungsi tertentu dalam masyarakat, Pemerintah, lembaga hukum, dan organisasi non-pemerintah. Hubungannya dengan *illegality*, White menunjukkan bahwa organisasi dan lembaga tidak selalu berfungsi sesuai hukum. Dalam

banyak kasus, aktivitas ilegal dapat menjadi bagian integral dari operasional organisasi. Misalnya, korupsi sering kali dipandang sebagai cara untuk mempercepat suatu proses atau memperoleh sumber daya.

BAB III

PROFIL KOTA SEMARANG DAN KECAMATAN NGALIYAN, PARKIR TEPI JALAN, DAN PEMUDA PANCASILA DI KECAMATAN NGALIYAN

A. Profil Kota Semarang dan Kecamatan Ngaliyan

1. Kondisi Geografis

Kota Semarang adalah ibu kota Provinsi Jawa Tengah yang telah berdiri sejak tanggal 2 Mei 1547. Terletak di tengah-tengah Pulau Jawa, Kota Semarang memiliki posisi geografis antara garis lintang selatan $6^{\circ} 50' - 7^{\circ} 10'$ dan garis bujur timur $109^{\circ} 35' - 110^{\circ} 50'$. Keberadaan Kota Semarang sebagai pusat pemerintahan Provinsi Jawa Tengah didukung oleh lokasinya yang strategis di jalur lalu lintas ekonomi Pulau Jawa. Hal ini menjadikan Kota Semarang tidak hanya berperan sebagai pusat pemerintahan, tetapi juga sebagai salah satu pusat ekonomi di Jawa Tengah. Kota Semarang memiliki posisi yang strategis sebagai koridor pembangunan di Provinsi Jawa Tengah, dengan empat pintu gerbang utama yaitu koridor pantai utara, koridor selatan, koridor timur, dan koridor barat. Selain itu, Kota Semarang juga dilengkapi dengan berbagai fasilitas transportasi penting seperti Pelabuhan Tanjung Emas, Bandar Udara Internasional Ahmad Yani, Terminal Terboyo, Stasiun Kereta Api Tawang, dan Stasiun Kereta Api Poncol. Fasilitas transportasi ini semakin memperkuat peran Kota Semarang sebagai pusat aktivitas pembangunan dan pintu gerbang ekonomi di Provinsi Jawa Tengah serta di bagian tengah Pulau Jawa.

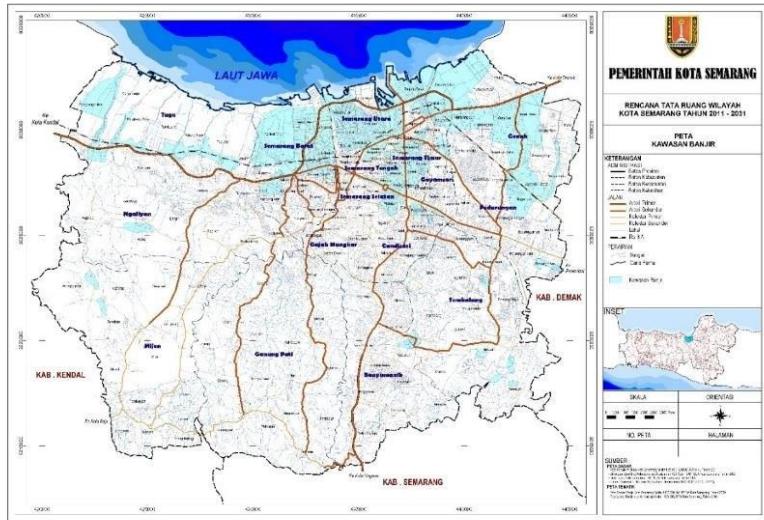
Kota Semarang memiliki batas-batas wilayah administrasi sebagai berikut:

Sebelah Utara: Laut Jawa

Sebelah Selatan: Kabupaten Semarang

Sebelah Timur: Kabupaten Demak dan Kabupaten Grobogan

Sebelah Barat: Kabupaten Kendal



Gambar 3. 1 Peta Kota Semarang

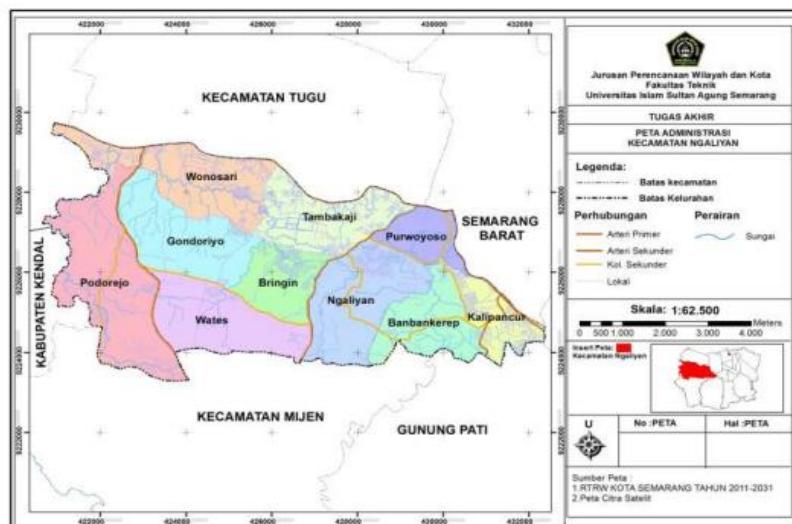
Sumber : Semarangkota.go.id

Kecamatan Ngaliyan terletak di sebelah barat Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut: Sebelah utara: Kecamatan Tugu, Sebelah barat: Kabupaten Kendal, Sebelah selatan: Kecamatan Mijen, Sebelah timur: Kecamatan Semarang Barat. Sebelum menjadi sebuah kecamatan, Ngaliyan merupakan kelurahan di dalam wilayah Kecamatan Tugu. Kecamatan Ngaliyan memiliki luas wilayah 4.490,84 ha, dan terbagi menjadi 10 wilayah kelurahan, 122 RW, 868 RT. Adapun nama – nama kelurahan yang berada diwilayah Kecamatan Ngaliyan adalah Kelurahan Gondoriyo, Kelurahan Podorejo, Kelurahan Bringin, Kelurahan Purwoyoso, Kelurahan Kalipancur, Kelurahan Bambankerep, Kelurahan Ngaliyan, Kelurahan Tambakaji, Kelurahan Wonosari dan Kelurahan Tambakaji. Kecamatan Ngaliyan memiliki posisi yang strategis karena menjadi penghubung antara Semarang dan

Kendal. Lokasinya yang cukup tinggi menjadikan wilayah ini bebas banjir dan sangat cocok untuk dijadikan kawasan hunian.

Kecamatan Ngaliyan merupakan salah satu kecamatan dari 16 kecamatan yang berada di Kota Semarang yang berada di daerah pinggiran sebelah barat Kota Semarang dengan batas – batas wilayah sebagai berikut

- a. Sebelah Utara : Kecamatan Tugu Kota Semarang
- b. Sebelah Barat : Kabupaten Kendal
- c. Sebelah Selatan : Kecamatan Mijen Kota Semarang
- d. Sebelah Timur : Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang



Gambar 3. 2 Peta Administrasi Kecamatan Ngaliyan

Sumber : Monografi Kecamatan Ngaliyan

2. Kondisi Demografis

Dalam aspek administratif, Kota Semarang terdiri dari 16 kecamatan dan 177 kelurahan. Wilayah kecamatan memiliki variasi luas, di mana terdapat dua kecamatan yang memiliki luas terbesar dan dua kecamatan dengan luas terkecil. Kecamatan yang paling luas terletak di bagian selatan Kota Semarang, dengan sebagian besar wilayahnya masih memiliki potensi

dalam sektor pertanian dan perkebunan. Kecamatan Mijen memiliki luas wilayah mencapai 57,55 km², sementara Kecamatan Gunungpati memiliki luas wilayah sebesar 54,11 km². Di sisi lain, Kecamatan dengan luas terkecil adalah Kecamatan Semarang Selatan yang meliputi wilayah seluas 5,93 km², dan Kecamatan Semarang Tengah yang memiliki luas wilayah sebesar 6,14 km². Kedua kecamatan ini merupakan pusat kota dan juga menjadi pusat perekonomian atau bisnis Kota Semarang. Karena itu, sebagian besar wilayahnya didominasi oleh bangunan bersejarah yang terkenal, seperti Kawasan Simpang Lima, Kawasan Tugu Muda, Pasar Bulu, Pasar Peterongan, Pasar Johar, dan sekitarnya, yang secara kolektif dikenal sebagai "Kota Lama" Semarang.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 50 tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan kendal serta penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah, Kecamatan Ngaliyan memiliki luas wilayah 3.181.96 Ha, dan terbagi menjadi 10 wilayah kelurahan, 122 RW, 868 RT. Adapun nama – nama kelurahan yang berada diwilayah Kecamatan Ngaliyan adalah Kelurahan Gondoriyo, Kelurahan Podorejo, Kelurahan Bringin, Kelurahan Purwoyoso, Kelurahan Kalipancur, Kelurahan Bambankerep, Kelurahan Ngaliyan, Kelurahan Tambakaji, Kelurahan Wonosari dan Kelurahan Tambakaji. Pusat pemerintahan Kecamatan Ngaliyan berada di wilayah Kelurahan Ngaliyan.

No.	Kelurahan	Jumlah Penduduk		
		Laki - Laki	Perempuan	Jumlah
1.	Ngaliyan	7.403	7.196	14.599
2.	Tambakaji	10.532	10.487	21.019
3.	Wonosari	11.476	11.461	22.937
4.	Wates	2.380	2.423	4.803
5.	Gondoriyo	3.620	3.610	7.230
6.	Podorejo	4.391	4.455	8.846
7.	Bringin	8.228	8.232	16.460
8.	Purwoyoso	8.377	8.346	16.723
9.	Kalipancur	9.684	9.781	5.853
10.	Bambankerep	3.024	3.007	6.031
Jumlah		69.115	68.998	138.113

Gambar 3. 3 Tabel Jumlah Penduduk Kecamatan Ngaliyan

Sumber : Monografi Kecamatan Ngliyan

Data tersebut mengilustrasikan bahwa persebaran penduduk di Kecamatan Ngaliyan sangatlah signifikan perbedaannya. Ada beberapa kelurahan yang memiliki kepadatan penduduk yang tinggi dan beberapa lainnya memiliki kepadatan penduduk yang rendah. Hal ini cukup membuktikan bahwa kepadatan penduduk di Kecamatan Ngaliyan tidaklah tersebar secara merata.

3. Kondisi Sosial, Politik, Ekonomi

a. Kondisi Sosial

Kondisi sosial masyarakat di Kecamatan Ngaliyan dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk pendidikan dan program sosial pemerintah. Meskipun ada program seperti Program Keluarga Harapan (PKH) untuk mengurangi kemiskinan, masih terdapat tantangan dalam

implementasinya, dengan beberapa keluarga penerima manfaat tidak memenuhi komitmen kesehatan dan pendidikan. Kecamatan Ngaliyan merupakan salah satu kecamatan di Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, yang memiliki dinamika sosial cukup kompleks. Kecamatan ini terletak di bagian barat Kota Semarang, berbatasan dengan Kabupaten Kendal di sebelah barat. Sebagai kawasan yang berkembang pesat, kondisi sosial di Ngaliyan dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk urbanisasi, pertumbuhan penduduk, dan keberagaman ekonomi. Berikut adalah penjelasan detail tentang kondisi sosial di Kecamatan Ngaliyan:

- Kompoisisi Penduduk: Kecamatan Ngaliyan merupakan wilayah dengan populasi yang terus berkembang. Salah satu penyebabnya adalah masuknya pendatang baru yang berasal dari luar Kota Semarang, baik untuk bekerja maupun menetap karena lokasinya yang strategis dan akses transportasi yang baik. Banyak kawasan perumahan baru yang tumbuh di daerah ini. Penduduk Ngaliyan terdiri dari berbagai kelompok usia, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa dan lansia. Jumlah penduduk usia produktif (15-64 tahun) relatif tinggi, yang mendorong dinamika sosial dan ekonomi di wilayah ini. Masyarakat di Ngaliyan cukup heterogen dengan keberagaman etnis dan agama. Mayoritas penduduknya adalah etnis Jawa, namun terdapat pula kelompok pendatang dari berbagai suku di Indonesia seperti Sunda, Batak, dan Tionghoa. Dari segi agama, mayoritas penduduk menganut Islam, namun ada juga pemeluk agama Kristen, Katolik, Hindu, dan Buddha.

- Urbanisasi: Ngaliyan merupakan salah satu kecamatan yang mengalami dampak urbanisasi signifikan. Banyak pendatang dari luar kota yang menetap di sini karena aksesibilitasnya yang baik ke pusat Kota Semarang, serta tersedianya berbagai fasilitas publik dan perumahan. Di kecamatan ini, terdapat banyak kawasan perumahan baru yang menarik perhatian penduduk kelas menengah dan menengah ke atas. Kawasan-kawasan ini menjadi bagian dari ekspansi wilayah permukiman akibat keterbatasan lahan di pusat kota. Pemerintah setempat terus memperbaiki infrastruktur di Kecamatan Ngaliyan, mulai dari jalan raya, fasilitas kesehatan, hingga jaringan air bersih. Hal ini menarik lebih banyak pendatang dan mendorong pertumbuhan ekonomi.
- Keberagaman Ekonomi: Kecamatan Ngaliyan dikenal sebagai kawasan yang sedang berkembang pesat, khususnya dengan maraknya pembangunan perumahan, baik kelas menengah ke atas maupun rumah bersubsidi. Di sisi lain, wilayah ini juga memiliki beberapa kawasan industri kecil hingga menengah, sehingga banyak warga setempat yang bekerja di sektor industri. Aktivitas perdagangan di Ngaliyan cukup dinamis. Banyak pasar tradisional dan pusat perbelanjaan modern, seperti minimarket, yang tumbuh pesat di wilayah ini. Selain itu, usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) juga menjadi salah satu penggerak ekonomi lokal, dengan banyaknya usaha kuliner, bengkel, dan warung kelontong yang dikelola oleh warga.

b. Kondisi Politik

Kecamatan Ngaliyan, sebagai bagian dari Kota Semarang, memiliki dinamika politik yang mencerminkan situasi politik pada skala kota dan provinsi. Seperti wilayah urban lainnya, kondisi politik di Ngaliyan dipengaruhi oleh partisipasi politik masyarakat, isu-isu politik lokal, serta kebijakan pemerintah daerah. Berikut adalah penjelasan lebih rinci mengenai kondisi politik di Kecamatan Ngaliyan:

- Partisipasi Politik Masyarakat: Masyarakat di Kecamatan Ngaliyan cukup aktif dalam partisipasi politik, terutama dalam pemilu legislatif, pemilihan kepala daerah (Pilkada), serta pemilihan presiden (Pilpres). Tingkat partisipasi dalam pemilu di kecamatan ini cukup tinggi, yang menunjukkan kesadaran politik masyarakat yang relatif baik. Pada Pilkada Kota Semarang, misalnya, masyarakat di Ngaliyan berpartisipasi dalam memilih walikota dan wakil walikota yang akan memimpin kota. Sebagian besar penduduk Ngaliyan memiliki pemahaman yang baik tentang hak politik mereka, khususnya kelompok usia produktif dan pemuda. Ini terlihat dari keterlibatan mereka dalam kampanye politik dan diskusi-diskusi mengenai kebijakan lokal yang mempengaruhi kehidupan mereka. Meski demikian, ada juga sebagian kecil masyarakat yang apatis terhadap politik, terutama mereka yang kurang teredukasi atau memiliki akses terbatas terhadap informasi politik.
- Isu-isu Politik Lokal: Salah satu isu politik utama di Ngaliyan adalah masalah pembangunan infrastruktur.

Karena Ngaliyan mengalami urbanisasi dan ekspansi perumahan yang pesat, masyarakat sering kali menuntut pemerintah daerah untuk memperbaiki infrastruktur seperti jalan, drainase, dan akses air bersih. Kebijakan pemerintah terkait program bantuan sosial, subsidi, dan lapangan kerja juga menjadi isu politik yang cukup sensitif di Ngaliyan. Sebagian masyarakat, terutama yang berada di sektor ekonomi menengah ke bawah, berharap pemerintah dapat memberikan solusi atas masalah kemiskinan, pengangguran, dan biaya hidup yang semakin tinggi.

- Kebijakan Pemerintah Daerah: kebijakan publik di Kecamatan Ngaliyan perlu diperhatikan untuk menghindari praktik-praktik yang merugikan masyarakat. Misalnya, penerapan tarif parkir yang tidak adil dapat merugikan pengguna jasa parkir dan mengurangi kenyamanan dalam penggunaannya. Oleh karena itu, pengawasan dari pemerintah sangat penting dalam pelaksanaannya. Dengan demikian, kondisi politik di Kecamatan Ngaliyan mencerminkan dinamika masyarakat yang kompleks dengan berbagai potensi dan tantangan. Meningkatkan keterlibatan masyarakat dan pengawasan kebijakan publik dapat membantu meningkatkan efektivitas pemerintahan di kecamatan ini.

c. Kondisi Ekonomi

Kecamatan Ngaliyan di Kota Semarang memiliki kondisi ekonomi yang dinamis dan berkembang pesat, dipengaruhi oleh pertumbuhan penduduk, urbanisasi, dan pengembangan infrastruktur. Wilayah ini merupakan salah satu kecamatan yang menjadi pusat pertumbuhan baru di Kota Semarang, karena lokasinya yang strategis di bagian barat kota dan aksesibilitas yang baik. Kecamatan Ngaliyan memiliki beberapa potensi yang dapat dikembangkan baik dalam hal ekonomi maupun pariwisata, antara lain :

- Penghasil Jambu Kristal

Kelurahan Wates Kecamatan Ngaliyan merupakan sentra penghasil jambu kristal yang cukup besar. Di wilayah ini juga terdapat perkebunan milik Pemerintah Kota Semarang yang ditanami pohon jambu kristal. Selama ini baik penduduk setempat maupun perkebunan menjual produk jambu kristal tanpa melalui proses pengolahan maupun pengemasan yang menarik.

- Sentra Penghasil Criping Gadung

Kelurahan Podorejo Kecamatan Ngaliyan merupakan kelurahan yang masyarakatnya banyak bermata pencaharian sebagai pengrajin criping gadung mentah, dengan pemasaran sekitar Mangkang sampai dengan Kaliwungu Kendal. 31 Warga masyarakat memanfaatkan tanah sekitar permukiman mereka yang masih berupa hutan dan kebun untuk menanam umbi gadung. Hanya saja, produk yang mereka hasilkan masih berupa criping gadung mentah dan belum dikembangkan menjadi produk lainnya.

- Curug Karangjoho – Gondoriyo

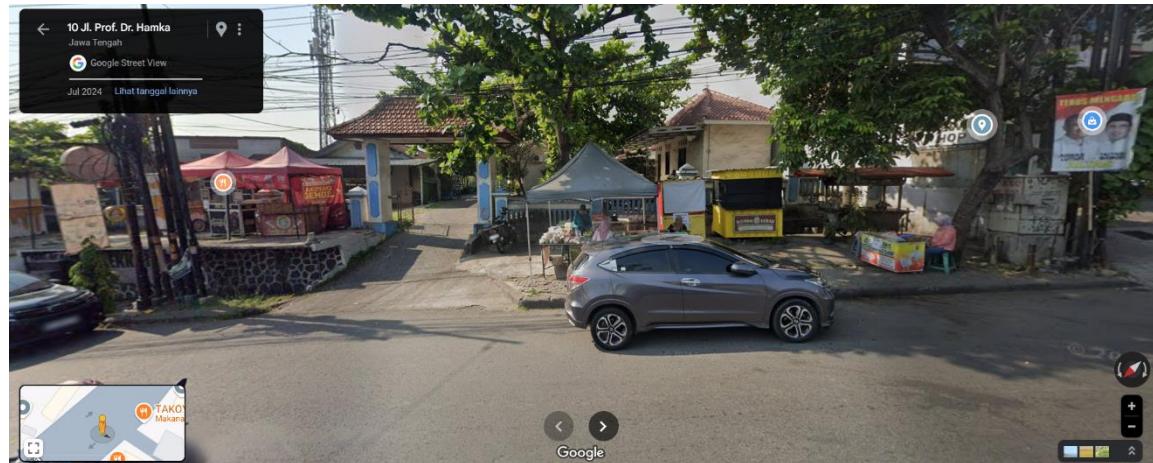
Curug Karangjoho terletak di Rt 04 Rw 04 Kelurahan Gondoriyo dan memiliki ketinggian 20 meter. Aliran sungai sumber air terjun ini dijamin aman karena merupakan Daerah Aliran Sungai (DAS) dari beberapa sungai kecil yang berada di daerah Bukit Semarang Baru (BSB) (Ngaliyan, 2023).

B. Parkir Tepi Jalan Kecamatan Ngaliyan

Berdasarkan Perwali Kota Semarang No. 70 Tahun 2001 tentang Pelayanan Parkir di Tepi jalan Umum, dengan tujuan agar lalu lintas berjalan dengan lancar, aman, dan tertib Pemerintah Kota Semarang perlu melakukan penataan parkir di tepi jalan umum. Tidak dapat dipungkiri semakin banyak parkir tepi jalan umum di area Kota Semarang khususnya di tengah perkotaan yang semakin padat lalu lintas, pemukiman, pusat keramaian dan pusat perbelanjaan. Banyaknya titik parkir jalan umum yang digunakan di sepanjang tepi jalan sehingga kemacetan pun tidak dapat dihindari. Parkir tepi jalan tersebut juga menjadi salah satu pilihan alternatif pengunjung yang ingin mengunjungi tempat tujuan seperti pusat pedagang kaki lima.

Fenomena parkir yang disebabkan oleh pedagang kaki lima menyebabkan kondisi lalu lintas semakin buruk, terutama pada jam sibuk pagi dan sore hari. Seringkali pengendara memarkir mobilnya sembarangan di dekat pedagang kaki lima untuk berbelanja karena terburu-buru atau karena terbatasnya tempat parkir. Hal ini mempersempit jalan yang harus dilalui kendaraan, sehingga mengurangi kapasitas jalan dan menimbulkan kemacetan. Karena tingginya kepadatan aktivitas di pusat kota dan meningkatnya jumlah kendaraan, maka kebutuhan akan tempat parkir pun semakin meningkat, seiring dengan banyaknya pengunjung yang datang dengan mobil dan membutuhkan tempat parkir, terutama parkir pinggir jalan, untuk berbagai keperluan mahal.

Tempat parkir di pusat kota terbatas, terutama di tempat parkir di luar badan jalan. Jika lahan parkir tidak mencukupi, masyarakat justru akan menggunakan sisi jalan sehingga dapat memperburuk kondisi lalu lintas dan menimbulkan kemacetan, terutama pada jam sibuk pagi dan sore hari.



Gambar 3. 4 Titik Pertama Terjadinya Parkir Tepi Jalan

Sumber : Google.maps



Gambar 3. 5 Titik Kedua Terjadinya Parkir Tepi Jalan

Sumber : Dokumentasi Penulis

Parkir tepi jalan yang di teliti memiliki dua titik, titik pertama pada terjadi ketika pagi hari terdapat parkir di tepi jalan yang bertepatan di Jalan Prof. Dr. Hamka Ngaliyan yang mana menyebabkan kemacetan serta rawannya kecelakaan pada titik ruko-ruko sekitar jam 05.59 dimana waktu tersebut banyak masyarakat yang sedang membeli sarapan dan memakirkan kendaraannya di tepi jalan yang memakan badan jalan, lahan parkir tersebut memiliki lebar 7 meter. Pada titik 2, ketika sore menjelang maghrib sekitar jam 17.59 pada jam tersebut banyak masyarakat yang pulang kantor ataupun kuliah dan masyarakat yang mencari makan atau jajan, hal ini yang menjadi penyebab kemacetan lalu lintas pada titik tersebut banyaknya pedagang kaki lima (PKL) yang beroperasi dan para pembeli parkir kendaraan pada badan jalan karena kurangnya lahan parkir, lahan parkir yang di badan jalan memiliki lebar 9 meter dan memiliki 2 juru parkir.

C. Profil Pemuda Pancasila Kecamatan Ngaliyan

Profil Pemuda Pancasila di Kecamatan Ngaliyan, Semarang, mencerminkan organisasi kepemudaan yang aktif dan berperan dalam berbagai aspek sosial, politik, dan ekonomi. Berikut adalah penjelasan detail mengenai Pemuda Pancasila di wilayah ini:

1. Sejarah Pemuda Pancasila

Pemuda Pancasila adalah organisasi kemasyarakatan (ormas) di Indonesia yang didirikan pada tahun 1959, dengan tujuan awal mempertahankan ideologi Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Organisasi ini memiliki sejarah panjang yang terkait dengan dinamika politik, sosial, dan keamanan di Indonesia. Seiring waktu, Pemuda Pancasila berkembang menjadi salah satu ormas besar dan memiliki pengaruh yang signifikan dalam berbagai bidang, terutama politik dan keamanan. Didirikan pada tahun 1959 oleh Jenderal Abdul Haris Nasution, Pemuda Pancasila awalnya

berfungsi sebagai bagian dari respons terhadap ancaman komunisme, khususnya Partai Komunis Indonesia (PKI), yang kala itu semakin menguat di Indonesia. Pada era 1950-an, Indonesia berada dalam situasi yang penuh ketegangan politik antara berbagai ideologi, seperti nasionalisme, komunisme, dan Islam. Pemuda Pancasila didirikan untuk membela ideologi Pancasila dari pengaruh ideologi lain, terutama komunisme. Organisasi ini dibentuk dengan dukungan militer, khususnya oleh fraksi dalam Angkatan Darat yang dipimpin oleh Nasution, yang merasa perlu adanya kekuatan sipil yang bisa melawan kekuatan PKI di ranah sosial dan politik. Tujuan utama pemuda pancasila. adalah untuk mempertahankan dan menyebarluaskan ideologi Pancasila serta menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Organisasi ini menganggap Pancasila sebagai dasar yang tak tergantikan untuk kehidupan berbangsa dan bernegara, dan salah satu tujuan mereka adalah melawan segala bentuk ancaman terhadap Pancasila, baik dari dalam maupun luar negeri.

Peran pemuda pancasila dalam politik, sejak awal berdirinya, Pemuda Pancasila telah memainkan peran penting dalam politik Indonesia, khususnya dalam konteks pertarungan ideologi di era 1960-an. Organisasi ini terkenal karena peran aktifnya dalam Gerakan 30 September 1965, di mana Pemuda Pancasila terlibat dalam aksi-aksi massa yang menentang PKI dan membantu menumpas para simpatisan PKI setelah kegagalan kudeta tersebut. Srtuktur organisasi pemuda pancasila di setiap kecamatan biasanya membentuk ranting sebagai unit organisasi terkecil di wilayah kecamatan. Ranting ini dipimpin oleh seorang ketua ranting yang bertanggung jawab atas kegiatan Pemuda Pancasila di wilayah tersebut.

2. Peran dan Fungsi

Pemuda Pancasila (PP) adalah organisasi kepemudaan yang memiliki peran penting dalam masyarakat Indonesia, terutama dalam konteks sosial, politik, dan ekonomi. Berikut adalah penjelasan detail mengenai fungsi dan peran Pemuda Pancasila:

a. Pendidikan dan Pemberdayaan Pemuda

Pemuda Pancasila berperan dalam memberikan pendidikan dan pelatihan kepada anggotanya untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan. Ini mencakup:

- Pelatihan Keterampilan: Menyelenggarakan program pelatihan di berbagai bidang, seperti kewirausahaan, teknologi informasi, dan kepemimpinan.
- Pendidikan Nilai-Nilai Pancasila: Mengedukasi anggota dan masyarakat tentang pentingnya nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara.

b. Penggerak Sosial

Sebagai organisasi sosial, Pemuda Pancasila terlibat dalam berbagai kegiatan kemanusiaan dan sosial, seperti:

- Bakti Sosial: Mengadakan kegiatan bakti sosial untuk membantu masyarakat yang kurang mampu, seperti penyuluhan kesehatan, donor darah, dan bantuan bencana.
- Kegiatan Lingkungan: Melakukan aksi bersih-bersih lingkungan dan kampanye kesadaran lingkungan untuk menjaga kelestarian alam.

c. Peran dalam Politik

Pemuda Pancasila aktif dalam politik dengan tujuan menjaga stabilitas dan keamanan negara. Mereka berperan sebagai:

- Penjaga Stabilitas: Mengawasi jalannya pemilu dan mendorong partisipasi politik di kalangan pemuda untuk memastikan proses demokrasi.
- Advokasi Kebijakan: Menyuarkan aspirasi pemuda kepada pemerintah dan berpatisipasi dalam pembuatan kebijakan publik.

d. Pembangunan Ekonomi

Pemuda Pancasila juga berkontribusi pada pembangunan ekonomi lokal melalui:

- Pengembangan UMKM: Mendukung usaha mikro kecil menengah (UMKM) dengan memberikan pelatihan dan akses ke pasar.
- Kewirausahaan: Mendorong anggota untuk menjadi wirausaha dengan memberikan bimbingan dan dukungan modal.

e. Budaya dan Identitas Nasional

Pemuda Pancasila berperan dalam mempromosikan budaya lokal dan identitas nasional melalui:

- Kegiatan Budaya: Mengadakan festival seni, lomba kebudayaan, dan acara lainnya yang melibatkan masyarakat untuk memperkuat rasa kebersamaan.
- Pendidikan Sejarah: Meningkatkan kesadaran sejarah di kalangan pemuda agar mereka memahami perjalanan bangsa Indonesia.

Secara keseluruhan, Pemuda Pancasila memiliki beragam fungsi dan peran dalam membangun masyarakat yang lebih baik, memperkuat nilai-nilai kebangsaan, dan menjaga stabilitas politik di Indonesia. Organisasi ini berupaya untuk terus berkontribusi dalam pembangunan bangsa melalui berbagai kegiatan sosial, pendidikan, ekonomi, dan politik.

3. Struktural Organisasi

Pemuda Pancasila adalah organisasi kemasyarakatan yang memiliki struktur organisasi yang terorganisir dengan baik, termasuk di Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang. Berikut adalah penjelasan detail mengenai struktur organisasi Pemuda Pancasila di Kecamatan Ngaliyan. Struktur Organisasi Pemuda Pancasila Kecamatan Ngaliyan

a. Pengurus Cabang

Pengurus Cabang (PC) Pemuda Pancasila di Kecamatan Ngaliyan bertanggung jawab atas kegiatan organisasi di tingkat kecamatan. Mereka berfungsi untuk mengkoordinasi semua kegiatan dan program yang dilaksanakan oleh anggota.

b. Pengurus Anak Cabang

Di bawah Pengurus Cabang, terdapat Pengurus Anak Cabang (PAC) yang bertanggung jawab untuk mengelola kegiatan di tingkat kelurahan. Setiap kelurahan di Kecamatan Ngaliyan biasanya memiliki PAC Pemuda Pancasila.

c. Struktur Internal

Struktur internal dari Pemuda Pancasila Kecamatan Ngaliyan umumnya terdiri dari beberapa posisi penting, antara lain:

- Ketua: Memimpin organisasi dan bertanggung jawab atas semua kegiatan.
- Sekretaris: Mengelola administrasi dan dokumentasi organisasi.
- Bendahara: Bertanggung jawab atas keuangan organisasi.
- Divisi-divisi: Terdapat beberapa divisi yang menangani berbagai bidang seperti:
Divisi Kesejahteraan Sosial: Mengelola program-program sosial, Divisi Pendidikan dan Pelatihan: Menyusun program pelatihan untuk anggota. Divisi Humas: Mengatur hubungan dengan masyarakat dan media.

d. Anggota

Anggota Pemuda Pancasila terdiri dari berbagai kalangan muda yang memiliki komitmen terhadap nilai-nilai Pancasila. Mereka aktif dalam berbagai kegiatan sosial, politik, dan budaya di masyarakat.

e. Program Kerja

Pemuda Pancasila Kecamatan Ngaliyan memiliki program kerja yang fokus pada pengembangan masyarakat dan peningkatan kualitas hidup pemuda. Beberapa program tersebut meliputi:

- Kegiatan sosial seperti bakti sosial dan penyuluhan.
- Pelatihan keterampilan untuk anggota.
- Kegiatan olahraga dan seni untuk meningkatkan kreativitas pemuda.

f. Hubungan dengan Pemerintah

Pemuda Pancasila juga menjalin hubungan baik dengan pemerintah setempat, berkolaborasi dalam berbagai program pembangunan dan kegiatan sosial yang mendukung visi misi pemerintah.

Dengan struktur organisasi yang jelas dan terencana, Pemuda Pancasila di Kecamatan Ngaliyan berupaya untuk menjadi wadah bagi pemuda dalam berkontribusi positif bagi masyarakat serta menjaga nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.



Gambar 3. 6 Mako (Markas Komando) Pemuda Pancasila Ngaliyan

Sumber: Dokumentasi Penulis

Gambar diatas adalah mako (Markas Komandan) pemuda pancasila. Mako pemuda pancasila ialah salah satu tempat yang digunakan untuk kumpulan sebelum adanya kegiatan pemuda pancasila. Setiap wilayah, mulai dari tingkat pusat hingga daerah (provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, bahkan desa), biasanya memiliki Mako sebagai

tempat koordinasi, pelatihan, serta pengaturan program-program kerja Pemuda Pancasila. Beberapa fungsi Mako Pemuda Pancasila antara lain:

- Koordinasi Internal: Tempat di mana pengurus dan anggota berkumpul untuk merencanakan kegiatan, membuat kebijakan, dan mengambil keputusan strategis terkait organisasi.
- Pelatihan dan Pendidikan: Mako sering digunakan untuk memberikan pelatihan kepemimpinan, bela negara, serta pendidikan terkait wawasan kebangsaan kepada para anggota.
- Pusat Konsolidasi Politik: Pemuda Pancasila seringkali terlibat dalam kegiatan politik, terutama pada masa pemilihan umum. Mako menjadi pusat strategi untuk mendukung calon-calon politik yang sejalan dengan visi organisasi.
- Kegiatan Sosial: Selain urusan politik dan keamanan, Mako juga menjadi basis kegiatan sosial seperti bakti sosial, bantuan kemanusiaan, dan kegiatan-kegiatan kemasyarakatan lainnya.

Mako Pemuda Pancasila merupakan pusat kegiatan dan koordinasi dari ormas besar yang telah ada sejak masa awal kemerdekaan Indonesia. Sebagai organisasi yang lahir dari semangat mempertahankan Pancasila, Pemuda Pancasila memiliki sejarah panjang yang terkait dengan dinamika politik dan sosial di Indonesia. Meski organisasi ini kerap diliputi kontroversi, perannya dalam berbagai sektor tetap tidak bisa diabaikan, baik di bidang politik, sosial, maupun pertahanan kedaulatan ideologi.

BAB IV

Bagaimana Peran Pemuda Pancasila dalam Pengelolaan Parkir Tepi Jalan

Pada bab ini peneliti akan menjabarkan terkait peran Pemuda Pancasila dalam pengelolaan parkir tepi jalan. Peneliti akan menjelaskan terkait kebijakan parkir tepi jalan Kota Semarang, aktor yang terlibat dalam pengelolaan parkir, Pemuda Pancasila sebagai aktor informal dalam pengelolaan parkir tepi jalan, peran Pemuda Pancasila dalam pengelolaan parkir tepi jalan, dan relasi kuasa Pemuda Pancasila dan pemerintah dalam pengelolaan parkir.

A. Kebijakan Parkir Tepi Jalan Kota Semarang

Pada kebijakan terkait parkir tepi jalan Kota Semarang diatur pada Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2012 dan Peraturan Walikota No. 70 Tahun 2021, yang mana kebijakan ini sebagai upaya pemerintah Kota Semarang untuk mengelola parkir kendaraan di sepanjang jalan umum dan kebijakan ini untuk mengoptimalkan pengguna ruang jalan, meningkatkan kelancaran lalu lintas, dan mendukung pendapatan asli daerah.

Peraturan Daerah (Perda) No. 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum di Kota Semarang merupakan upaya pemerintah daerah untuk mengatur dan menertibkan pengelolaan parkir tepi jalan serta meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Kebijakan ini mencakup berbagai aspek yang berkaitan dengan pelayanan parkir, termasuk tarif, pengawasan, dan sanksi bagi pelanggar. Tujuan kebijakan ini untuk untuk menertibkan penggunaan ruang publik di tepi jalan, mengurangi parkir liar, dan menciptakan sistem parkir yang lebih teratur. Dengan menerapkan retribusi yang lebih jelas dan terstruktur, pemerintah daerah berharap dapat meningkatkan pendapatan dari sektor parkir.

Peraturan Walikota Semarang No. 70 Tahun 2021 tentang Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum merupakan langkah strategis untuk mengatur dan menertibkan sistem parkir di Kota Semarang. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan pelayanan, mengurangi pelanggaran, dan memaksimalkan pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor parkir. Dalam kebijakan perda dan perwali tersebut ada pengawasan dari Dinas Perhubungan Kota Semarang yang bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kebijakan tersebut.

“iya mas kami itu membantu Dinas Perhubungan untuk beroprasi dilapangan agar kebijakan itu berjalan sesuai peraturan yang ada” (wawancara bapak mukhtar sebagai ketua Pemuda Pancasila Ngaliyan)

Berdasarkan penjelasan bapak mukhtar sebagai ketua Pemuda Pancasila Ngaliyan bahwa dengan kebijakan yang terintegrasi dan berorientasi pada hubungan simbiosis, organisasi ini dapat bertransformasi menjadi mitra yang lebih profesional dalam pengelolaan parkir, meningkatkan efisiensi layanan, dan mengurangi potensi konflik dengan masyarakat atau otoritas setempat. Berdasarkan teori *State and Illegality*, kebijakan parkir tepi jalan di Semarang dapat dilihat sebagai upaya pemerintah untuk mengelola batas antara legalitas dan aktivitas informal. Pada teori Patron Klient juga dalam kebijakan parkir tepi jalan Kota Semarang memainkan peran penting dalam implementasi kebijakan. Namun, jika tidak dikelola dengan baik, hubungan ini dapat menciptakan ketergantungan, ketidakadilan, dan penyimpangan. Kebijakan ini efektif jika mampu menyeimbangkan kebutuhan masyarakat, efektivitas pendapatan daerah, dan penegakan hukum. Teori ini juga menyoroti bagaimana aktor negara dapat terlibat dalam aktivitas ilegal, baik secara langsung maupun tidak langsung, dan bagaimana kebijakan yang ada dapat menciptakan celah bagi praktik ilegal (Situmorang & Suprima, 2024).

B. Aktor yang terlibat dalam Pengelolaan Parkir

Pengelolaan parkir tepi jalan adalah salah satu aspek penting dalam tata kelola kota yang modern. Dengan meningkatnya jumlah kendaraan bermotor dan kebutuhan akan ruang parkir, tantangan untuk menciptakan sistem parkir yang teratur, efisien, dan ramah lingkungan menjadi semakin mendesak. Dalam proses ini, berbagai aktor terlibat, mulai dari pemerintah daerah sebagai pembuat kebijakan, Dinas Perhubungan yang melaksanakan kebijakan, hingga bekerja sama dengan organisasi masyarakat serta masyarakat sekitar agar kebijakan berjalan secara lancar. Hubungan simbiosis yang baik antara para pemangku kepentingan menjadi kunci keberhasilan dalam menciptakan solusi parkir yang tidak hanya mempermudah aksesibilitas, tetapi juga mendukung ketertiban dan kenyamanan ruang publik. Dengan memahami peran masing-masing aktor, kita dapat membangun sistem parkir yang mampu mengatasi berbagai tantangan perkotaan dan memberikan manfaat maksimal bagi semua pihak.

Dinas Perhubungan memiliki kuasa atas implementasi kebijakan tersebut dan mekanisme dilapangan sesuai peraturan yang ada, dari Dinas Perhubungan biasanya berkerjasama dengan organisasi masyarakat yang bisa mengelola parkir tepi jalan seperti Lindu Aji dan Pemuda Pancasila. Setiap organisasi masyarakat memiliki titiknya masing-masing di jalan Prof. Dr. Hamka Ngaliyan. Organisasi masyarakat Lindu Aji adalah sebuah organisasi masyarakat (ormas) yang berfokus pada kegiatan sosial dan kemasyarakatan. Organisasi ini dikenal karena perannya dalam berbagai kegiatan sosial, budaya, dan lingkungan, serta upayanya untuk memberdayakan masyarakat di sekitarnya.

Lindu Aji memiliki struktur organisasi yang terdiri dari pengurus pusat dan pengurus daerah. Pengurus ini bertanggung jawab dalam perencanaan dan pelaksanaan program-program organisasi serta menjaga hubungan baik dengan anggota dan masyarakat. Ormas Lindu Aji berperan penting dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui berbagai program sosial, pendidikan, dan

lingkungan. Dengan fokus pada pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kesejahteraan, Lindu Aji menjadi salah satu ormas yang berkontribusi positif bagi perkembangan sosial. Ormas Lindu Aji ini juga bekerja sama dengan dinas perhubungan untuk mengelola parkir tepi jalan dan lahan kosong agar kebijakan berjalan dengan lancar. Titik pembagian pengawasan dari Ormas Lindu Aji dari ruko bagian timur jembatan sampai sebelah jembatan, terbagai 2 titik yang di bagian ruko mengenai pengelolaan parkir sedangkan di bagian sebelah jembatan itu terkait pengelolaan lahan kosong dan parkir. Titik pengawasan untuk Pemuda Pancasila yaitu di bagian sisi barat jembatan yang mana pemuda pancasila mengelola lahan kososng dan parkir.

“kami (Pemuda Pancasila) itu bekerja sama Dinas Perhubungan soal pengelolaan parkir dan pemanfaatan lahan kosong mas. Tapi biasanya klo ada masalah dari masyarakat dari kami yang menangani langsung. Oh ya mas, setau saya bukan hanya Pemuda Pancasila yang bekerja sama dengan Dinas Perhubungan soal pengelolaan parkir”
(wawancara bapak muhtar sebagai ketua pemuda pancasila)

Berdasarkan pernyataan bapak mukhtar sebagai ketua Pemuda Pancasila bahwa organisasi masyarakat juga berperan dalam penguasaan wilayah terkait parkir liar. Mereka dapat mengklaim area tertentu dan mengatur juru parkir di bawah kendali mereka, menciptakan sistem informal yang sulit untuk dibongkar oleh pihak berwenang. Analisis aktor dalam pengelolaan parkir melalui lensa teori *state and illegality* menunjukkan bahwa keberadaan praktik ilegal tidak terlepas dari interaksi kompleks antara berbagai aktor, termasuk juru parkir, pemilik usaha, aparat penegak hukum, dan organisasi masyarakat. Pengelolaan parkir adalah sistem kompleks yang melibatkan banyak aktor dengan hubungan Patron Klient. Untuk menciptakan sistem yang adil dan efisien, perlu dilakukan penguatan transparansi, pemberdayaan aktor lapangan seperti juru parkir, serta penerapan mekanisme pengawasan yang efektif. Dalam konteks pengelolaan parkir, praktik ilegal seperti parkir liar dapat terjadi akibat lemahnya penegakan hukum atau kolusi antara aparat penegak hukum dan pelaku usaha (Rahman, 2024).

C. Pemuda Pancasila Sebagai Aktor Internal dalam Pengelolaan Parkir

Dalam dinamika yang semakin kompleks, pengelolaan ruang publik, termasuk parkir tepi jalan, menjadi salah satu tantangan utama bagi pemerintah dan masyarakat. Di tengah kebutuhan akan sistem transportasi yang efisien dan teratur, muncul berbagai aktor yang berperan dalam menciptakan solusi yang berkelanjutan. Salah satunya adalah Pemuda Pancasila, sebuah organisasi kemasyarakatan yang tidak hanya berfokus pada pengembangan kepemudaan, tetapi juga berkontribusi dalam pengelolaan sumber daya publik. Pemuda Pancasila hadir sebagai aktor internal yang berperan penting dalam pengelolaan parkir, menjalin kerjasama dengan sektor swasta dan pemerintah daerah untuk menciptakan sistem yang lebih terstruktur dan efisien. Dengan pendekatan kolaboratif, mereka tidak hanya mengelola juru parkir tetapi juga memastikan keamanan dan ketertiban di area parkir. Melalui peran ini, Pemuda Pancasila berkontribusi pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta memberikan dampak positif bagi masyarakat.

Pemuda Pancasila (PP) berperan sebagai aktor internal dalam pengelolaan parkir, terutama dalam konteks kerja sama dengan pemerintah daerah. Berikut adalah penjelasan mengenai peran dan kontribusi Pemuda Pancasila dalam pengelolaan parkir:

a. Pengelolaan Juru Parkir

Sebagai bagian dari pengelolaan parkir, Pemuda Pancasila mengkoordinasikan juru parkir (jukir) di berbagai lokasi. Ketua MPC Pemuda Pancasila Ngaliyan menyatakan bahwa setiap ketua PAC PP akan menjadi koordinator untuk pengelolaan parkir, sehingga menciptakan sistem yang terstruktur dalam pengelolaan parkir

b. Tanggung Jawab Keamanan

Pemuda Pancasila juga memiliki tanggung jawab terhadap keamanan juru parkir yang mereka tunjuk. Dalam kerjasama tersebut, keamanan dan

perlindungan bagi jukir menjadi tanggung jawab PP, yang menunjukkan komitmen mereka dalam menjaga ketertiban di area parkir

c. Sinergi dengan Pemerintah

Kerja sama antara Pemuda Pancasila dan pemerintah daerah menciptakan sinergi yang positif dalam pengelolaan sumber daya publik. Dengan melibatkan Pemuda Pancasila, pemerintah dapat memanfaatkan jaringan dan sumber daya yang ada untuk meningkatkan kualitas layanan publik.

“Kalau dibilang formal, kami tidak terikat langsung dengan Dinas Perhubungan (Dishub) atau aturan resmi dari pemerintah kota, tapi kami berkoordinasi dengan mereka. Bisa dibilang ini lebih ke arah informal, tapi kami tetap punya tanggung jawab, termasuk menjaga ketertiban dan keamanan”. (wawancara mas h sebagai anggota Pemuda Pancasila)

“Kami melihat ini sebagai salah satu bentuk kontribusi kami untuk masyarakat. Selain memberikan lapangan pekerjaan bagi anggota, kami juga membantu menciptakan keamanan dan ketertiban di kawasan tersebut. Jadi, meskipun informal, kami merasa ini cukup bermanfaat”. (wawancara mas h sebagai anggota Pemuda Pancasila)

Berdasarkan pernyataan mas h sebagai anggota Pemuda Pancasila bahwa Pemuda Pancasila Ngaliyan memainkan peran signifikan dalam menyediakan layanan pengelolaan parkir, tetapi peran ini tidak sepenuhnya berada di regulasi resmi pemerintah. Pada teori *state and illegality*, Pemuda Pancasila berfungsi sebagai aktor yang mengisi kekosongan peran negara dalam pengelolaan parkir tepi jalan. Keberadaan mereka menunjukkan ambiguitas antara pemerintah dan praktik ilegal yang sering kali saling berhubungan simbiosis untuk menciptakan stabilitas. Keterlibatan Pemuda Pancasila dalam pengelolaan parkir mencerminkan dinamika *Patron Klient* yang kompleks. Sebagai klient, PP bergantung pada pemerintah untuk legitimasi, tetapi juga berperan sebagai sub-patron bagi juru parkir di bawahnya. Hubungan ini dapat membawa stabilitas operasional, tetapi juga

berisiko menciptakan ketergantungan dan penyimpangan jika tidak dikelola secara transparan dan adil. Namun, hubungan ini membutuhkan pengawasan dan regulasi yang lebih baik untuk mengurangi potensi konflik dan memastikan bahwa praktik ini tidak merugikan masyarakat. Transformasi dari aktor informal menjadi entitas formal mungkin menjadi solusi jangka panjang yang dapat mengatasi dilema legalitas, tanpa menghilangkan peran sosial dan ekonomi yang sudah mereka bangun (Ramadhan, 2024).

D. Peran Pemuda Pancasila dalam Pengelolaan Parkir

Pemuda Pancasila (PP) berperan penting dalam pengelolaan parkir tepi jalan di banyak daerah di Indonesia, terutama di kota-kota besar. Peran ini memiliki berbagai dimensi, mulai dari fungsi sosial, ekonomi, hingga politik. Berikut adalah penjelasan detail tentang bagaimana Pemuda Pancasila berperan dalam tata kelola parkir tepi jalan:

1. Pengelolaan dan Penataan Area Parkir

Pemuda Pancasila sering mengambil peran dalam mengelola parkir di tepi jalan yang biasanya terletak di area komersial, pusat perbelanjaan, atau lokasi dengan kepadatan lalu lintas tinggi. Dalam hal ini, peran mereka meliputi:

- Pengaturan Parkir yang Teratur: Pemuda Pancasila membantu mengarahkan kendaraan untuk diparkir dengan tertib di sepanjang jalan, menghindari parkir sembarangan yang bisa mengganggu lalu lintas. Mereka memastikan bahwa kendaraan diparkir secara rapi dan tidak melanggar aturan yang dapat membahayakan pengguna jalan lain.
- Optimalisasi Lahan: Dengan keterbatasan lahan parkir di tepi jalan, Pemuda Pancasila berperan dalam memaksimalkan penggunaan ruang parkir yang ada, memastikan kapasitas parkir

digunakan dengan efisien, dan meminimalkan kemacetan yang disebabkan oleh kendaraan yang mencari tempat parkir.

2. Penjagaan Keamanan Parkir

Salah satu peran penting Pemuda Pancasila dalam pengelolaan parkir tepi jalan adalah menjaga keamanan kendaraan yang diparkir. Keamanan menjadi perhatian utama bagi pemilik kendaraan, dan Pemuda Pancasila sering dipercaya untuk menjaga agar kendaraan tetap aman dari pencurian atau kerusakan. Kontribusi mereka dalam hal ini meliputi:

- Pengawasan Langsung: Anggota Pemuda Pancasila sering kali berjaga di lokasi parkir untuk memastikan tidak ada tindakan kriminal, seperti pencurian kendaraan atau barang-barang di dalam kendaraan. Keberadaan mereka juga berfungsi sebagai tindakan pencegahan yang efektif terhadap ancaman kejahatan.
- Proteksi Terhadap Kendaraan: Selain menjaga dari tindakan kriminal, mereka juga menjaga kendaraan dari risiko kerusakan, seperti dari gesekan dengan kendaraan lain atau pejalan kaki. Hal ini penting terutama di area yang ramai dengan lalu lintas atau aktivitas masyarakat.

“Gini mas, peran dari pemuda pancasila itu ya mengelola terkait ijin pengelolaan dan penataan lahan pedangang, parkir serta memberikan keamanan dan pengawasan kepada para pedangang kaki lima dari pungutan liar mas” (wawancara bapak edi selaku pedagang kaki lima).

Berdasarkan wawancara dengan bapak edi selaku pedagang kaki lima yang merasakan kehadiran pemuda pancasila bahwa ormas tersebut memiliki peran berarti untuk para pedagang kaki lima.

Peran Pemuda Pancasila dalam pengelolaan parkir tepi jalan mencerminkan dinamika kompleks antara negara, masyarakat, dan praktik ilegal. Meskipun mereka

berkontribusi pada pemberdayaan ekonomi anggota dan pengaturan ruang publik, tindakan mereka sering kali berada di batas legalitas, menimbulkan tantangan bagi pemerintah dalam menegakkan hukum dan menciptakan keadilan sosial. Pemuda Pancasila sering terlibat dalam pengelolaan parkir tepi jalan dengan cara mengambil alih kontrol atas area tersebut. Mereka dapat berfungsi sebagai pengatur parkir informal, yang sering kali tidak memiliki izin resmi dari pemerintah (Wiguna K. C., 2013)

3. Pengelolaan Retribusi Parkir

Pemuda Pancasila sering bertindak sebagai pengelola pungutan atau retribusi parkir di tepi jalan, baik secara formal maupun informal. Dalam beberapa kasus, mereka bekerja sama dengan pemerintah daerah, tetapi di banyak kasus lainnya, mereka mengambil inisiatif sendiri untuk menarik retribusi parkir. Fungsi ini memiliki beberapa aspek penting:

- Pengumpulan Biaya Parkir: Pemuda Pancasila mengumpulkan biaya dari pemilik kendaraan yang parkir di tepi jalan. Biaya ini bisa bersifat resmi jika disetujui oleh pemerintah daerah atau tidak resmi, tergantung pada konteks lokal. Mereka memastikan bahwa setiap kendaraan yang menggunakan lahan parkir membayar biaya sesuai kesepakatan lokal.
- Distribusi Ekonomi untuk Anggota: Pungutan parkir ini sering kali menjadi salah satu sumber pendapatan bagi anggota Pemuda Pancasila, terutama bagi mereka yang terlibat langsung dalam pengelolaan parkir. Pendapatan ini menjadi bagian dari pemberdayaan ekonomi anggota yang terlibat dalam kegiatan pengelolaan parkir.
- Transparansi dan Akuntabilitas: Dalam beberapa kasus, terdapat kekhawatiran mengenai kurangnya transparansi dalam pengelolaan retribusi parkir yang dilakukan oleh organisasi

informal seperti Pemuda Pancasila. Terkadang ada tuntutan dari masyarakat atau pemerintah agar pengelolaan retribusi dilakukan dengan lebih terbuka, terutama jika parkir tersebut berada di area publik yang strategis.

“Jadi setiap bulan itu para pedagang kaki lima itu setiap bulannya setor mas ke pemuda pancasila untuk pengelolaan tersebut dan keamanan mas. Nah, jadi salah satu sumber pendapatan anggota mas” (wawancara bapak mukhtar selaku ketua pemuda pancasila kec. Ngaliyan).

Berdasarkan pernyataan dari bapak mukhtar selaku ketua pemuda pancasila kec. Ngaliyan bahwa pengelolaan tersebut menjadi salah satu sumber pendapatan anggota pemuda pancasila untuk kehidupannya.

Praktik ini terjadi di ruang abu-abu, di mana secara formal mereka tidak memiliki otoritas untuk memungut retribusi, tetapi dalam kenyataannya, mereka beroperasi dengan tingkat toleransi tertentu dari pihak berwenang. Pengelolaan retribusi parkir dalam konteks teori *state and illegality* menunjukkan adanya keterlibatan aktor non-negara yang mengambil alih peran negara dalam pengelolaan layanan publik. Meskipun praktik ini secara formal ilegal, aktor-aktor seperti ormas atau kelompok preman seringkali beroperasi dengan toleransi atau hubungan simbiosis dari aparat negara, menciptakan situasi ambiguitas legalitas. Pengelolaan retribusi parkir mencerminkan hubungan patron-klient yang kompleks antara pemerintah, pengelola, juru parkir, dan masyarakat. Ketergantungan yang tinggi dan lemahnya pengawasan sering kali menyebabkan penyimpangan dan ketidakadilan. Pemuda Pancasila memainkan peran penting dalam pengelolaan retribusi parkir, namun praktik-praktik ilegal dan kurangnya pengawasan dapat merugikan pendapatan daerah serta menciptakan ketidakpuasan di masyarakat (Nango, 2023).

4. Pemberdayaan Anggota dan Masyarakat

Pemuda Pancasila juga memainkan peran penting dalam pemberdayaan ekonomi dan sosial anggotanya melalui pengelolaan parkir tepi jalan. Peran ini berkontribusi pada kesejahteraan anggota organisasi, terutama mereka yang tidak memiliki pekerjaan tetap. Berikut adalah beberapa aspek dari pemberdayaan ini:

- Peluang Kerja bagi Anggota: Melalui pengelolaan parkir, Pemuda Pancasila memberikan peluang kerja bagi anggotanya yang mungkin tidak memiliki akses ke pekerjaan formal. Mereka yang bertugas di lapangan mendapatkan penghasilan dari biaya parkir yang dikumpulkan.
- Pemberdayaan Komunitas Lokal: Selain anggotanya sendiri, Pemuda Pancasila juga kadang memberdayakan masyarakat setempat untuk ikut serta dalam pengelolaan parkir. Ini menciptakan peluang kerja bagi komunitas sekitar, yang sering kali terlibat langsung dalam menjaga dan mengelola lahan parkir.

5. Mediasi dan Pengelolaan Konflik

Dalam konteks parkir tepi jalan, konflik antara masyarakat, pengguna jalan, pemerintah, dan kelompok lain bisa terjadi. Pemuda Pancasila sering berperan sebagai mediator dalam konflik ini. Mereka menjaga agar tidak terjadi konflik di lapangan, baik itu antara pengguna parkir maupun dengan pihak berwenang. Beberapa aspek peran mereka dalam mediasi konflik meliputi:

- Menjaga Hubungan Harmonis dengan Aparat Keamanan: Sebagai organisasi yang memiliki hubungan erat dengan aparat keamanan, Pemuda Pancasila sering kali membantu dalam menyelesaikan masalah atau potensi konflik yang mungkin

muncul terkait pengelolaan parkir. Mereka menjaga agar situasi tetap kondusif, terutama di area yang ramai dan rawan konflik.

- Menengahi Konflik Antar Pengguna Parkir: Dalam area yang padat, terkadang terjadi gesekan antara pengguna parkir, terutama jika ada ketidaksepakatan mengenai tempat parkir atau biaya. Pemuda Pancasila sering kali turun tangan untuk menengahi dan menyelesaikan konflik ini.

“Alhamdulillah mas di titik yang di kelola pemuda pancasila itu ketika ada konflik langsung terselesaikan. Jadi, waktu itu pernah ada konflik terkait lahan pedagang kaki lima dan lahan parkir. Nah, konfliknya itu sama orang proyek pembangunan tol terkait pengusuran lahan pedagang kaki lima tapi langsung kita tanganin mas” (wawancara bapak mukhtar ketua pemuda pancasila).

Berdasarkan penjelasan dari bapak mukhtar ketika ada konflik dititik yang di kelola pemuda pancasila itu langsung di tangani dan di selesaikan secepat mungkin. Konflik yang terjadi di wilayah-wilayah dengan ambiguitas legalitas sering kali mencerminkan ketegangan antara aktor negara dan aktor non-negara.

Dalam konteks ini, konflik bisa muncul dari bentrokan kepentingan, perebutan sumber daya, kontrol teritorial, atau pertarungan politik antara aktor yang beroperasi di ruang legalitas yang abu-abu. Konflik ini dapat melibatkan berbagai pihak, seperti kelompok kriminal, organisasi masyarakat, perusahaan swasta, dan bahkan pemerintah itu sendiri. State dan illegality menunjukkan bahwa hubungan antara negara dan masyarakat sangat kompleks. Ketidakadilan dalam penegakan hukum dapat memicu tindakan ilegal sebagai bentuk perlakuan terhadap sistem yang dianggap tidak adil. Untuk menciptakan stabilitas sosial, penting bagi negara untuk meningkatkan transparansi dan

akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya serta memastikan bahwa semua warga mendapatkan perlakuan yang adil di hadapan hukum (Ridho, 2016).

6. Keterlibatan dalam Penegakan Aturan Lalu Lintas Lokal

Pemuda Pancasila tidak hanya terlibat dalam pengelolaan lahan parkir, tetapi juga mendukung penegakan aturan lalu lintas di sekitar area parkir. Mereka berkolaborasi dengan pemerintah daerah atau aparat keamanan dalam menata arus lalu lintas yang sering terganggu akibat parkir liar atau pengguna parkir yang tidak disiplin. Beberapa kontribusi mereka dalam hal ini adalah:

- Mencegah Parkir Liar: Pemuda Pancasila sering kali berperan dalam mencegah kendaraan parkir sembarangan di tepi jalan yang bisa menyebabkan kemacetan. Mereka memastikan bahwa parkir dilakukan sesuai dengan aturan dan di area yang diperbolehkan.
- Koordinasi dengan Aparat Lalu Lintas: Di beberapa daerah, Pemuda Pancasila bekerja sama dengan dinas perhubungan atau kepolisian dalam menata parkir tepi jalan agar tidak melanggar aturan lalu lintas yang berlaku, misalnya dengan memastikan jarak parkir dari simpang jalan atau pintu masuk fasilitas umum.

7. Keterlibatan dalam Acara Khusus

Pemuda Pancasila sering dilibatkan dalam pengelolaan parkir selama acara-acara besar, seperti konser, acara keagamaan, atau festival. Dalam situasi ini, mereka memainkan peran penting dalam mengatur aliran kendaraan yang sering kali meningkat drastis selama acara. Kontribusi mereka mencakup:

- Penataan Sementara: Selama acara besar, lahan parkir sementara sering dibutuhkan. Pemuda Pancasila membantu dalam pengaturan lahan sementara tersebut, memastikan bahwa parkir dilakukan dengan teratur dan tidak mengganggu jalannya acara.

- Pengendalian Massa: Mereka juga sering membantu mengarahkan massa dan kendaraan agar tidak terjadi penumpukan atau kemacetan yang berlebihan, terutama di sekitar area parkir tepi jalan.



Gambar 4. 1 Pemuda Pancasila Dalam Acara Donor Darah

Sumber: jatengprov.go.id

Gambar di atas adalah contoh pemuda pancasila yang terlibat dalam donor darah yang berperan sebagai bentuk kemuniasaan serta memberikan keamanan kepada masyarakat sekitar.

Dalam acara-acara seperti ini, Pemuda Pancasila sering terlibat dalam beragam peran, termasuk menjaga keamanan, atau mengorganisir kegiatan sosial. Mereka berfungsi sebagai salah satu elemen masyarakat sipil yang berperan dalam kegiatan komunitas, sekaligus memperlihatkan identitas organisasi mereka secara jelas di ruang publik.

Keterlibatan Pemuda Pancasila dalam acara-acara khusus mencerminkan usaha mereka untuk mendapatkan legitimasi dari negara dan memperkuat posisi mereka di masyarakat. Namun, praktik ilegal dan konflik internal serta eksternal menunjukkan bahwa dinamika kekuasaan yang kompleks tetap ada. Untuk memastikan bahwa peran PP sebagai organisasi masyarakat tetap positif, penting bagi mereka untuk menegakkan prinsip-prinsip hukum dan etika serta menghindari praktik-praktik yang merugikan masyarakat dan reputasi organisasi itu sendiri (Kurniawan, 2015).

8. Hubungan simbiosis dengan Pemerintah Daerah

Pemuda Pancasila sering berhubungan simbiosis dengan pemerintah daerah dalam tata kelola parkir, terutama di daerah yang padat. Dalam beberapa kasus, mereka diberi wewenang oleh pemerintah untuk mengelola parkir tepi jalan di wilayah tertentu. Kolaborasi ini melibatkan:

- Pengelolaan Resmi: Pemuda Pancasila, di bawah pengawasan pemerintah daerah, sering kali diberi izin resmi untuk mengelola parkir tepi jalan di area tertentu, terutama di wilayah yang sulit dijangkau oleh aparat resmi karena keterbatasan sumber daya.
- Penegakan Kebijakan Lokal: Dalam hal ini, mereka juga membantu menegakkan kebijakan pemerintah terkait parkir, seperti tarif parkir resmi, waktu parkir, atau larangan parkir di area tertentu.



Gambar 4. 2 Pemuda Pancasila Keterlibatan Pada Pemerintah Daerah

Sumber: news.detik/walkot-semarang

Pada gambar di atas adalah salah satu acara dari wali kota semarang yang melibatkan pemuda pancasila dalam menjaga kondusivitas pemilu agar pemilu berjalan dengan lancar dan aman.

Hubungan simbiosis antara Pemuda Pancasila dan pemerintah daerah memiliki potensi besar untuk mendukung pembangunan sosial dan politik di Indonesia. Namun, penting untuk memastikan bahwa hubungan simbiosis ini berlangsung secara transparan dan akuntabel untuk mencegah praktik ilegal yang dapat merugikan kedua belah pihak serta masyarakat luas. Hubungan simbiosis antara pemerintah daerah dan pihak-pihak tertentu dapat dilihat sebagai relasi Patron Klient yang saling menguntungkan. Pemerintah sebagai patron memberikan akses, perlindungan, dan legitimasi kepada klient, sementara klient berkontribusi pada layanan publik, stabilitas, atau pendapatan daerah. Namun, untuk menjaga keseimbangan dan keadilan dalam hubungan ini, diperlukan transparansi, pengawasan, dan distribusi manfaat yang lebih

merata. Dengan pendekatan yang tepat, Pemuda Pancasila dapat berfungsi sebagai mitra strategis bagi pemerintah dalam mewujudkan visi pembangunan yang adil dan berkelanjutan (Azhari, 2018).

Pemuda Pancasila memiliki peran yang signifikan dalam tata kelola parkir tepi jalan. Mereka tidak hanya berfungsi sebagai pengelola parkir tetapi juga berperan dalam menjaga ketertiban, keamanan, serta pemberdayaan ekonomi bagi anggotanya. Selain itu, mereka juga memainkan peran politik dengan berhubungan simbiosis dengan pemerintah dan aparat keamanan dalam menata parkir tepi jalan, terutama di wilayah perkotaan yang padat. Namun, penting untuk memastikan bahwa peran ini dilakukan secara transparan dan sesuai dengan aturan yang berlaku agar tidak menimbulkan masalah atau gesekan dengan pihak lain. Peran Pemuda Pancasila dalam pengelolaan parkir mencerminkan dinamika patron-klient yang kompleks. Pemerintah sebagai patron utama memberikan legitimasi kepada PP, sementara PP bertindak sebagai sub-patron bagi anggotanya di lapangan. Relasi ini dapat menghasilkan manfaat bagi semua pihak, tetapi juga menghadapi tantangan seperti ketidakadilan distribusi pendapatan, kurangnya transparansi, dan konflik sosial. Pada *State and Illegality* membantu memahami bagaimana Pemuda Pancasila dan pemerintah berinteraksi dalam pengelolaan parkir, di mana ada tumpang tindih antara legalitas dan praktik informal. Hubungan ini memperlihatkan adanya dinamika kekuasaan yang kompleks. Hubungan antara Pemuda Pancasila dan pengelolaan parkir menunjukkan interaksi yang kompleks antara regulasi negara dan praktik ilegal. Meskipun PP memiliki potensi untuk berkontribusi positif terhadap pengelolaan parkir dan pendapatan daerah, praktik ilegal seperti pungutan liar dan kolusi dapat merusak reputasi mereka serta menimbulkan ketidakpuasan di masyarakat (Tanjung, 2022).

E. Relasi Kuasa Pemuda Pancasila dan Pemerintah dalam Pengelolaan Parkir

Relasi kuasa antara Pemuda Pancasila (PP) di Ngaliyan, Semarang, dan pemerintah dalam pengelolaan parkir menunjukkan keterlibatan Pemuda Pancasila dalam fungsi informal publik. Pemuda Pancasila sering mengelola parkir secara tidak langsung melalui hubungan dengan individu atau kelompok lokal. Pemerintah, melalui Dinas Perhubungan, memiliki kebijakan resmi untuk pengelolaan parkir, tetapi praktik di lapangan memperlihatkan adanya celah yang dimanfaatkan Pemuda Pancasila.

Hubungan simbiosis semacam ini dapat terjadi karena pemerintah membutuhkan stabilitas dan pengawasan di lokasi-lokasi parkir yang sulit dikelola langsung. Namun, sering terjadi konflik, termasuk dengan warga atau kelompok lain, yang menciptakan tantangan dalam mencapai ketertiban parkir dan optimalisasi retribusi. Di Semarang secara umum, pemerintah juga menghadapi kendala dalam meminimalisir praktik parkir liar dan memastikan dana retribusi masuk secara maksimal, meskipun telah dilakukan kerja sama dengan tim Saber Pungli. Pemuda Pancasila dapat mengambil peran karena memiliki kapasitas anggota dan pengaruh sosial yang signifikan.

Pemuda Pancasila dapat beroperasi dengan dukungan dari aparat pemerintah atau oknum tertentu yang memberikan perlindungan terhadap praktik mereka. Hal ini menciptakan hubungan simbiosis di mana Pemuda Pancasila mendapatkan legitimasi untuk beroperasi, sementara pemerintah mungkin mendapatkan keuntungan dari retribusi tidak resmi atau dukungan politik. Pemuda Pancasila memiliki kemampuan untuk mempengaruhi kebijakan lokal melalui lobi atau tekanan terhadap pemerintah. Mereka dapat menyuarakan aspirasi masyarakat atau menentang kebijakan yang dianggap merugikan anggota mereka, sehingga menciptakan ketegangan antara kepentingan organisasi dan kebijakan pemerintah.

Pemuda Pancasila sering terlibat dalam praktik parkir liar, di mana mereka mengklaim area parkir tanpa izin resmi dari Dinas Perhubungan. Ini adalah contoh dari *illegality* yang muncul ketika aktor informal beroperasi di luar kerangka hukum yang ditetapkan oleh pemerintah.

Pemuda Pancasila di Ngaliyan sering terlibat dalam pengelolaan parkir tanpa hubungan kontrak formal dengan pemerintah. Dalam kerangka *state and illegality*, ini mencerminkan keberadaan "wilayah abu-abu" di mana ormas seperti PP beroperasi: PP menyediakan pengaturan parkir yang "dibutuhkan" di area yang tidak diawasi pemerintah, sehingga pemerintah tidak sepenuhnya menekan aktivitas mereka. Pemerintah secara tidak langsung mengakui keberadaan PP dengan tidak selalu menegakkan hukum secara tegas di lapangan.

Pemerintah dan tolerasi terhadap praktik informal, Praktik informal yang dilakukan PP sering didorong oleh kebutuhan lokal, seperti pengaturan lalu lintas atau keamanan parkir, yang tidak dapat sepenuhnya disediakan oleh pemerintah: Toleransi Pemerintah: Pemerintah terkadang menghindari konflik langsung dengan PP karena ormas ini memiliki kapasitas mobilisasi sosial yang besar dan pengaruh politik. Pragmatismenya Negara: Pemerintah daerah cenderung memprioritaskan ketertiban dan stabilitas sosial daripada menegakkan aturan secara kaku, sehingga membuka ruang bagi PP untuk beroperasi secara informal.

"Kami tidak secara resmi mengelola parkir, tetapi anggota PP sering membantu mengatur parkir, terutama di lokasi-lokasi yang tidak sepenuhnya diawasi pemerintah. Kegiatan ini juga membantu anggota memperoleh penghasilan tambahan. Tidak ada kontrak formal, tetapi pemerintah kadang "memahami" peran kami di lapangan. Beberapa anggota bertugas atas inisiatif sendiri karena kebutuhan masyarakat atau kerja sama tidak langsung dengan pihak swasta". (wawancara bapak mukhtar sebagai ketua Pemuda Pancasila)

Berdasarkan pernyataan bapak mukhtar sebagai ketua Pemuda Pancasila bahwa relasi kuasa antara Pemuda Pancasila dan pemerintah dalam pengelolaan parkir di Ngaliyan menunjukkan bagaimana interaksi antara aktor formal dan informal dapat menciptakan ruang bagi praktik ilegal. Teori *State and Illegality* menjelaskan hubungan antara negara dan praktik ilegal atau semi-legal, menunjukkan bagaimana pemerintah terkadang mentoleransi aktivitas informal untuk tujuan stabilitas atau kontrol sosial. Relasi kuasa antara Pemuda Pancasila dan pemerintah daerah dalam pengelolaan parkir mencerminkan pola patron-klient yang kompleks. Pemerintah bertindak sebagai patron utama yang memberikan legitimasi dan akses kepada PP, sementara PP memanfaatkan hubungan ini untuk memperkuat posisi sosial-ekonomi mereka. Meskipun hubungan ini bersifat saling menguntungkan, terdapat tantangan berupa ketergantungan, potensi penyalahgunaan kekuasaan, dan ketidakpuasan masyarakat. Dalam konteks relasi Pemuda Pancasila (PP) di Ngaliyan dan pemerintah terkait pengelolaan parkir tepi jalan, teori ini relevan untuk memahami dinamika kekuasaan. Pemerintah mentoleransi aktivitas semi-legal ini untuk menjaga stabilitas dan menghindari konflik, tetapi pada saat yang sama, keberadaan PP di lapangan menunjukkan batasan pemerintah dalam mengatur ruang publik secara penuh. Integrasi PP ke dalam sistem formal dapat menjadi solusi, meskipun memerlukan strategi yang hati-hati untuk menghindari eskalasi konflik.

BAB V

Dampak Peran Pemuda Pancasila dalam Pengelolaan Parkir Tepi Jalan Kepada Masyarakat Sekitar

Keberadaan Pemuda Pancasila dalam pengelolaan parkir tepi jalan menjadi fenomena yang umum di banyak kota besar dan berkembang, khususnya di negara-negara berkembang seperti Indonesia. Meski bersifat non-formal dan sering kali tidak terdata dalam sistem hukum atau peraturan pemerintah, peran organisasi ini sangat signifikan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat, terutama di wilayah perkotaan dengan tingkat kepadatan kendaraan yang tinggi. Pengelolaan parkir tepi jalan oleh Pemuda Pancasila sering kali diisi oleh warga setempat yang memanfaatkan peluang ekonomi dari terbatasnya lahan parkir dan tingginya kebutuhan masyarakat akan tempat parkir yang mudah diakses.

Namun, pengelolaan parkir yang dilakukan tanpa regulasi resmi juga membawa berbagai dampak, baik positif maupun negatif, terhadap masyarakat sekitar. Di satu sisi, peran mereka membantu menciptakan lapangan kerja bagi penduduk lokal dan memberikan rasa aman bagi pemilik kendaraan yang parkir di bawah pengawasan mereka. Di sisi lain, tanpa adanya regulasi yang jelas, organisasi ini dapat menciptakan berbagai masalah, mulai dari ketidakteraturan tata ruang kota, kepadatan lalu lintas, hingga potensi konflik sosial akibat praktik pungutan liar dan pengelolaan parkir yang tidak adil.

Peran organisasi kemasyarakatan seperti Pemuda Pancasila dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat sering menjadi sorotan, terutama ketika menyangkut pengelolaan fasilitas publik, seperti parkir tepi jalan. Sebagai organisasi dengan jaringan luas, Pemuda Pancasila kerap dipercaya atau mengambil inisiatif dalam mengatur parkir di berbagai lokasi strategis, baik di pusat kota maupun di daerah

pinggiran. Pengelolaan parkir oleh organisasi ini membawa berbagai dampak terhadap masyarakat sekitar, yang dapat dilihat dari aspek sosial, ekonomi, dan tata ruang.

Di satu sisi, peran mereka dapat memberikan dampak positif, seperti meningkatkan rasa aman bagi pengguna fasilitas parkir, menciptakan lapangan pekerjaan, dan memberikan kontribusi pada kegiatan sosial di komunitas. Namun, di sisi lain, pengelolaan ini juga kerap menimbulkan sejumlah persoalan, seperti tarif yang tidak transparan, potensi gangguan lalu lintas, hingga konflik dengan masyarakat setempat.

Fenomena ini memunculkan pertanyaan penting: sejauh mana pengelolaan parkir oleh Pemuda Pancasila memberikan manfaat atau justru membawa masalah bagi masyarakat sekitar? Untuk memahami hal ini secara mendalam, diperlukan tinjauan terhadap pengalaman langsung dari berbagai pihak yang terkena dampak, termasuk mahasiswa, pedagang, dan warga lokal. Dari situ, dapat dirumuskan evaluasi yang lebih obyektif mengenai efektivitas dan keberlanjutan peran organisasi ini dalam pengelolaan parkir.

1. Dampak Positif

Pemuda Pancasila, sebagai salah satu organisasi kemasyarakatan yang memiliki jaringan luas, sering berperan aktif dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk pengelolaan parkir tepi jalan. Di tengah kebutuhan masyarakat akan fasilitas parkir yang aman dan terorganisir, keterlibatan Pemuda Pancasila sering kali dilihat sebagai solusi yang efektif. Mereka tidak hanya mengatur lalu lintas parkir tetapi juga menciptakan struktur sosial yang mendukung keamanan dan ketertiban di wilayah tersebut.

Peran ini membawa berbagai dampak positif yang dirasakan oleh masyarakat sekitar. Mulai dari meningkatnya rasa aman hingga terciptanya peluang ekonomi baru, keterlibatan Pemuda Pancasila menjadi elemen penting dalam mendukung aktivitas

publik. Walaupun peran mereka sering disertai kritik, kontribusi positif ini tidak dapat diabaikan. Dalam memahami pengaruh mereka secara mendalam, penting untuk mengeksplorasi berbagai aspek positif yang dihasilkan dari pengelolaan parkir yang mereka lakukan.

1. Meningkatkan Keamanan Kendaraan

Salah satu manfaat utama dari pengelolaan parkir oleh Pemuda Pancasila adalah terciptanya rasa aman bagi pemilik kendaraan. Kehadiran anggota organisasi yang berjaga di area parkir dapat mencegah tindakan kriminal, seperti pencurian kendaraan atau barang-barang di dalamnya. Hal ini memberikan rasa nyaman kepada masyarakat saat mereka meninggalkan kendaraan di tepi jalan.

"Keamanan memang lebih terjamin dibandingkan sebelumnya. Mereka menjaga area parkir dengan baik, tapi saya sarankan ada pelatihan lebih lanjut soal manajemen keamanan." (Wawancara Mas Yudi sebagai Masyarakat sekitar)

"Transparansi dalam pengelolaan parkir juga penting untuk membangun kepercayaan masyarakat." (Wawancara dengan Mas Yudi sebagai Masyarakat Sekitar)

Berdasarkan pernyataan dari Mas Yudi sebagai masyarakat sekitar bahwa ketika hadirnya Pemuda Pancasila memberikan rasa aman kepada kendaraan masyarakat yang parkir. kehadiran juru parkir yang ditunjuk oleh PP dapat meningkatkan keamanan kendaraan. Juru parkir bertugas menjaga area parkir dan mencegah tindakan pencurian atau vandalisme. Dengan adanya pengawasan langsung, pengguna kendaraan merasa lebih aman saat meninggalkan kendaraan mereka. Pada teori *State and Illegality* menunjukkan bahwa peran Pemuda Pancasila dalam pengelolaan parkir tepi jalan memiliki dampak kompleks terhadap keamanan kendaraan. Meskipun ada potensi peningkatan keamanan melalui pengawasan, praktik ilegal seperti pungutan liar

menciptakan ketidakpastian dan merusak kepercayaan masyarakat terhadap sistem pengelolaan publik (Hapsari & Purwanto, 2020).

2. Menjaga Ketertiban Lalu Lintas

Ketertiban lalu lintas adalah fondasi penting dalam menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan efisien bagi pengguna jalan. Salah satu aspek yang sering kali menjadi tantangan dalam pengelolaan lalu lintas adalah parkir tepi jalan, yang apabila tidak diatur dengan baik, dapat menimbulkan berbagai masalah, seperti kemacetan, konflik antar pengguna jalan, hingga potensi kecelakaan. Dalam konteks ini, kehadiran Pemuda Pancasila sebagai organisasi kemasyarakatan memiliki peran yang signifikan dalam membantu mengelola parkir tepi jalan di berbagai daerah.

Pemuda Pancasila, dengan pendekatan berbasis komunitas, telah menjadi salah satu pelaku yang aktif dalam menjaga ketertiban lalu lintas, khususnya melalui pengelolaan area parkir tepi jalan. Dengan peran mereka, area parkir yang sebelumnya tidak terorganisir kini menjadi lebih tertata, mengurangi hambatan di jalan raya, dan meningkatkan kenyamanan baik bagi pengendara maupun pejalan kaki. Namun, dampak dari peran ini tidak hanya berhenti pada ketertiban semata. Ada dinamika sosial, ekonomi, dan keamanan yang turut terpengaruh, menciptakan peluang sekaligus tantangan bagi semua pihak yang terlibat.

“Bisa dibilang membantu, tapi tidak sepenuhnya. Memang, mereka membantu mengatur parkir dengan lebih tertib dibandingkan kalau tidak ada pengelola sama sekali. Kalau ada kendaraan yang parkir sembarangan, mereka langsung menegur. Masalahnya, cara mereka menegur kadang terlalu tegas dan ada yang merasa terintimidasi. Jadi, meskipun membantu, tetap saja ada warga

yang merasa sedikit terganggu”. (wawancara Bapak Hendra sebagai pedagang kaki lima/angkringan)

Berdasarkan pernyataan Bapak Hendra sebagai pedagang kaki lima/angkringan bahwa masyarakat umumnya melihat ada dampak positif dari peran Pemuda Pancasila dalam menjaga ketertiban parkir, seperti membantu mengatur kendaraan agar tidak parkir sembarangan dan mengurangi kemacetan. Teori *state and illegality* menyoroti hubungan anatara pemerintah dan aktor ketiga dalam konteks praktik ilegal. Dalam hal ini, pemuda pancasila sering kali beroperasi di luar kerangka hukum resmi dalam pengelolaan parkir. Dampak keterlibatan Pemuda Pancasila dalam pengelolaan parkir tepi jalan terhadap ketertiban umum menunjukkan adanya interaksi kompleks antara praktik ilegal dan struktur kekuasaan yang ada. Meskipun mereka dapat berfungsi sebagai agen penegakan ketertiban, praktik pungutan liar dan konflik antar organisasi sering kali merusak citra mereka dan menciptakan ketidakpastian bagi masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih terintegrasi antara pemerintah dan organisasi masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman dan tertib bagi semua pihak (Abriansyah, 2022).

3. Membuka Lapangan Kerja

Pengelolaan parkir memberikan peluang pekerjaan, terutama bagi anggota organisasi atau masyarakat lokal. Hal ini membantu mengurangi angka pengangguran di daerah tersebut, sekaligus meningkatkan pendapatan bagi individu yang terlibat dalam pengelolaan parkir.

Dampak positif dari pengelolaan parkir tepi jalan oleh Pemuda Pancasila mencerminkan kontribusi nyata mereka terhadap masyarakat. Mulai dari

keamanan hingga pemberdayaan ekonomi, peran ini memberikan nilai tambah yang signifikan.

“Mereka sering juga membantu dalam kegiatan sosial seperti bersih-bersih lingkungan atau keamanan lingkungan. Tapi di sisi lain, ada beberapa yang merasa terganggu karena sistem parkirnya dianggap terlalu mahal. Kebanyakan masyarakat setuju karena memang parkir jadi lebih teratur, walaupun tarifnya kadang diperdebatkan. Tapi, dibandingkan dengan sebelumnya yang semrawut, ini lebih baik.” (wawancara Bapak Hendra sebagai pedagang kaki lima/angkringan)

Berdasarkan pernyataan Bapak Hendra bahwa pengelolaan parkir yang terstruktur dapat menghasilkan pendapatan bagi organisasi dan anggotanya, memberikan mereka mata pencaharian yang lebih stabil. Dengan adanya pengelolaan yang baik, diharapkan praktik parkir liar dapat diminimalisir, sehingga meningkatkan keamanan dan kenyamanan bagi pengguna jalan. Pada teori *State and Illegality*, Pemuda Pancasila memiliki potensi besar untuk membuka lapangan kerja melalui pengelolaan parkir tepi jalan. Dengan kolaborasi antara organisasi ini dan pemerintah serta penegakan hukum yang lebih ketat terhadap praktik ilegal, tidak hanya akan menciptakan peluang kerja baru tetapi juga meningkatkan kualitas layanan publik dan mengurangi kemacetan di Kota Semarang (Simanjorang, dkk 2024).

4. Penataan Ruang dan Tata Kelola

Parkir tepi jalan yang dikelola secara informal dapat menyebabkan gangguan terhadap arus lalu lintas, peningkatan kepadatan kendaraan di area tertentu, serta penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan peruntukannya.

Misalnya, jalan-jalan yang seharusnya berfungsi untuk lalu lintas kendaraan dan pejalan kaki berubah menjadi area parkir, sehingga mempersempit ruang gerak dan mengurangi efektivitas jalur transportasi.

Dalam teori *state and illegality*, salah satu dampak utama dari aktivitas informal yang tidak teratur adalah kerusakan pada penataan ruang publik. Pemuda Pancasila, sebagai organisasi yang mengelola parkir tepi jalan secara informal, sering kali tidak mengikuti aturan tata kota yang ditetapkan oleh pemerintah. Pengelolaan parkir yang mereka lakukan cenderung berbasis pada kebutuhan sesaat dan tidak mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap penataan ruang.

Dampak ini tidak hanya merugikan tata ruang kota, tetapi juga memicu berbagai masalah lingkungan seperti polusi udara (akibat kemacetan yang disebabkan oleh kendaraan yang terparkir sembarangan), serta peningkatan polusi suara dan pencemaran lainnya yang mengganggu kualitas hidup warga sekitar.

“Mereka sebenarnya muncul karena ada kebutuhan dari masyarakat, mas. Lahan parkir minim, sementara banyak orang yang datang membawa kendaraan. Akhirnya, Pemuda Pancasila melihat peluang dan mengambil inisiatif untuk mengatur parkir, meski tanpa izin resmi. Masyarakat tidak keberatan, karena ada rasa aman ketika parkir dijaga mereka. Tapi, memang masalah tata kota ini jadi akar permasalahannya”. (wawancara Bapak Hendra sebagai pedagang kaki lima/angkringan)

Dari pernyataan bapak hendra sebagai pedagang kaki lima/angkringan bahwa kegagalan penataan ruang kota, khususnya dalam penyediaan lahan parkir, menjadi alasan utama mengapa Pemuda Pancasila mengambil peran

dalam pengelolaan parkir di pinggir jalan. Masyarakat menerima peran Pemuda Pancasila ini karena mereka merasa terbantu, baik dalam hal keamanan maupun pengaturan parkir, meskipun mereka tidak memiliki izin resmi. Namun, praktik parkir di pinggir jalan sering menyebabkan kemacetan dan dianggap kurang ideal. Melalui teori *state and illegality* dapat memahami bahwa kegagalan penataan ruang dan implementasi hukum yang kurang transparan merupakan faktor utama dalam timbulnya illegalitas dalam pengelolaan parkir tepi jalan oleh pemuda pancasila.

5. Potensi Legitimasi Sosial Meskipun di Luar Hukum

Legitimasi sosial ini memungkinkan Pemuda Pancasila untuk terus beroperasi meskipun secara hukum formal, aktivitas mereka bisa dianggap ilegal atau tidak sesuai dengan peraturan. Salah satu poin penting dari teori state and illegality adalah bahwa aktivitas yang bersifat informal atau ilegal bisa mendapatkan legitimasi sosial di mata masyarakat, meskipun tidak memiliki legitimasi hukum. Pemuda Pancasila, sebagai organisasi informal yang terlibat dalam pengelolaan parkir, sering kali mendapatkan pengakuan sosial dari masyarakat setempat karena mereka dianggap menyediakan solusi bagi kebutuhan nyata, yakni parkir.

“Selamat malam, mas. Ya, di lingkungan sini memang Pemuda Pancasila punya peran dalam pengelolaan parkir, terutama di tempat-tempat yang ramai seperti daerah pedagang kaki lima. Mereka yang menjaga keamanan parkir dan lahan disini”. (wawancara Bapak Hendra sebagai pedagang kaki lima/angkringan)

“Setau saya memang peran mereka tidak didasarkan pada izin resmi, tapi masyarakat sudah terbiasa dengan keberadaan mereka. Pemuda Pancasila memang tidak punya izin

formal untuk mengelola parkir, tetapi masyarakat merasa aman karena ada mereka yang menjaga keamanan, terutama di tempat yang ramai". (wawancara Bapak Hendra sebagai pedagang kaki lima/angkringan)

Dari pernyataan Bapak Hendra sebagai pedagang kaki lima/angkringan bahwa masyarakat menganggap peran Pemuda Pancasila dalam pengelolaan parkir sebagai sah meskipun tidak memiliki izin resmi. Legitimasi sosial terhadap peran mereka tumbuh dari kebutuhan masyarakat akan keamanan dan ketertiban, terutama di area ramai seperti pasar dan pertokoan. Masyarakat merasakan manfaat langsung dari peran tersebut dan merasa lebih aman dengan adanya Pemuda Pancasila yang menjaga kendaraan mereka. Meskipun pernah ada upaya penertiban dari pihak berwenang, masyarakat lebih memilih untuk mendukung peran informal ini karena dianggap lebih responsif dan sesuai dengan kebutuhan lokal. Dalam konteks teori *state and illegality* Pemuda Pancasila sering mengklaim wilayah tertentu untuk pengelolaan parkir dan memungut biaya dari pengguna jalan tanpa izin resmi. Praktik ini menciptakan ketegangan antara hukum formal dan realitas sosial, di mana masyarakat sering kali melihat tindakan ini sebagai hal yang wajar. Legitimasi sosial Pemuda Pancasila dalam pengelola parkir tepi jalan meskipun berada di luar hukum menunjukkan kompleksitas interaksi antara pemerintah, masyarakat, dan praktik ilegal. Melalui teori *state and illegality* memahami bahwa illegalitas tidak hanya merupakan penyimpangan dari norma hukum tetapi juga berfungsi sebagai respons terhadap kondisi sosial-ekonomi yang ada (Sitorus, dkk 2022).

6. Pelemahan Pengendalian Pemerintah atas Lingkungan

Pengelolaan parkir informal yang dilakukan tanpa regulasi formal membuat pemerintah kehilangan kemampuan untuk mengontrol dampak lingkungan dari aktivitas ini. Tidak adanya aturan yang jelas mengenai di mana

kendaraan boleh diparkir atau bagaimana parkir harus dikelola menyebabkan ruang-ruang kota digunakan secara sembarangan, yang sering kali bertentangan dengan prinsip-prinsip keberlanjutan lingkungan.

Dalam perspektif teori *state and illegality*, aktivitas informal seperti pengelolaan parkir oleh organisasi Pemuda Pancasila dapat memperlemah kontrol negara terhadap ruang publik, termasuk dalam menjaga kualitas lingkungan. Ketika negara atau pemerintah daerah tidak mampu menegakkan aturan mengenai parkir atau penataan ruang kota, maka organisasi-organisasi informal mengisi kekosongan tersebut. Namun, karena aktivitas mereka tidak terkoordinasi dengan aturan resmi, dampaknya bisa merusak tata kelola lingkungan

Pelelemahan kontrol negara ini juga memperburuk masalah lingkungan jangka panjang, di mana sulit bagi pemerintah untuk memperbaiki infrastruktur lingkungan seperti jalan, trotoar, atau drainase ketika area tersebut didominasi oleh aktivitas informal seperti parkir liar. Akibatnya, lingkungan bisa menjadi semakin tidak teratur dan sulit untuk ditata kembali.

“Dampaknya banyak sekali. Karena tidak ada pengaturan yang jelas dari pemerintah, Pemuda Pancasila akhirnya yang mengisi kekosongan itu dengan mengelola parkir secara mandiri. Mereka membantu masyarakat dengan mengatur kendaraan dan menjaga keamanan. Namun, karena pengelolaan ini tidak terstruktur secara resmi, dampaknya ada pada kondisi lingkungan. Misalnya, di sekitar sini jadi sering macet, dan sampah dari pengunjung pun semakin banyak karena tidak ada fasilitas atau aturan yang jelas”. (wawancara mas yudi sebagai masyarakat sekitar yang menjadi pedagang dimsum)

Berdasarkan pernyataan mas yudi sebagai mas yudi sebagai masyarakat sekitar yang menjadi pedagang dimsum bahwa lemahnya pengendalian pemerintah terhadap lingkungan, terutama dalam hal pengelolaan parkir dan fasilitas pendukungnya, telah menempatkan Pemuda Pancasila pada posisi yang sulit. Masyarakat melihat bahwa Pemuda Pancasila mengambil peran dalam pengaturan dan keamanan parkir sebagai respons atas kebutuhan yang tidak terpenuhi. Namun, karena kurangnya infrastruktur yang memadai, seperti lahan parkir dan fasilitas kebersihan, masalah lingkungan seperti sampah, kemacetan, dan ketidakteraturan lalu lintas tetap ada. Teori *state and illegality* menunjukkan bahwa interaksi antar aktor pemerintah dan organisasi masyarakat seperti pemuda pancasila sering kali melibatkan kolusi dan ketidakpastian, Masyarakat sering kali terjebak dalam situasi di mana mereka merasa tidak memiliki pilihan lain selain menerima keberadaan pemuda pancasila sebagai penyedia layanan parkir, meskipun tindakan tersebut melanggar hukum (Lukman, dkk 2012).

Dampak lingkungan dari peran Pemuda Pancasila dalam pengelolaan parkir tepi jalan sangat signifikan ketika dilihat melalui lensa *teori state and illegality*. Aktivitas parkir informal yang mereka kelola sering kali menyebabkan masalah dalam penataan ruang, kebersihan, polusi udara, dan degradasi lahan. Ketika negara gagal mengontrol atau mengatur aktivitas ini, dampak lingkungan yang negatif dapat semakin parah. Solusi yang mungkin adalah melalui formalisasi dan pengaturan ulang ruang publik, di mana negara dan organisasi informal dapat bekerja sama untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan dan menciptakan sistem parkir yang lebih berkelanjutan serta ramah lingkungan.

7. Potensi Intimidasi dan Ketergantungan Masyarakat

Praktik pungutan parkir yang tidak resmi atau yang lebih tinggi dari tarif yang ditetapkan pemerintah bisa dianggap sebagai bentuk pemerasan atau intimidasi, di mana pengguna parkir tidak punya pilihan lain selain membayar untuk merasa aman. Dalam situasi ini, keamanan yang dijanjikan berubah menjadi ancaman terselubung, di mana keamanan hanya terjamin selama pengguna parkir bersedia mengikuti aturan yang ditetapkan oleh kelompok informal tersebut.

Teori *state and illegality* menyoroti bahwa dalam beberapa kasus, Pemuda Pancasila yang mengambil alih kontrol atas ruang publik bisa menggunakan kekuatan atau intimidasi untuk mempertahankan kekuasaan mereka. Dalam konteks pengelolaan parkir oleh Pemuda Pancasila, meskipun beberapa pengguna parkir merasa terlindungi, ada juga potensi terjadinya intimidasi terhadap pengguna parkir, terutama jika mereka tidak mau membayar biaya parkir yang ditetapkan secara informal.

Di sisi lain, masyarakat yang tinggal di sekitar area yang dikelola Pemuda Pancasila juga bisa merasa terintimidasi, terutama jika ada persepsi bahwa organisasi ini menggunakan metode kekerasan atau koersif untuk mempertahankan kontrol atas area tersebut. Konflik dengan masyarakat lokal bisa muncul jika mereka merasa dipaksa untuk mengikuti aturan parkir yang tidak resmi atau jika mereka merasa bahwa aktivitas parkir ini merusak ketertiban di lingkungan mereka.

“Jujur saja, kadang kami merasa sedikit terintimidasi. Mungkin bukan intimidasi yang jelas, tapi lebih karena ada rasa segan. Mereka cukup tegas saat meminta tarif parkir, dan meski kadang kami keberatan, kami tetap membayar

karena takut bermasalah. Beberapa warga merasa tidak punya pilihan lain, apalagi kalau tempat parkir sudah dikuasai Pemuda Pancasila". (wawancara mas yudi sebagai masyarakat sekitar yang menjadi pedagang dimsum)

"Kami tidak bermaksud melakukan intimidasi, mas. Mungkin karena kami cukup tegas saat bekerja, masyarakat melihatnya sebagai intimidasi. Tapi sebenarnya, kami hanya menjalankan tugas dan memastikan keamanan. Tentang ketergantungan, memang benar bahwa masyarakat mengandalkan kami untuk menjaga kendaraan mereka. Kami melihatnya sebagai bentuk kepercayaan". (wawancara bapak mukhtar sebagai ketua pemuda pancasila)

Berdasarkan pernyataan di atas dari mas yudi dan bapak mukhtar ada dua pandangan yang berbeda. Masyarakat merasa terbantu, namun ada sedikit rasa tertekan karena mereka tidak memiliki alternatif lain dan merasa tergantung pada Pemuda Pancasila untuk keamanan kendaraan. Di sisi lain, Pemuda Pancasila menyatakan bahwa tujuan utama mereka adalah memberikan rasa aman dan menjaga ketertiban, bukan untuk menakut-nakuti. Analisis potensi intimidasi dan ketergantungan masyarakat terhadap peran Pemuda Pancasila dalam pengelolaan parkir tepi jalan menunjukkan bahwa terdapat hubungan kompleks antara aktor negara dan organisasi masyarakat. Teori State and Illegality memberikan kerangka kerja untuk memahami bagaimana praktik ilegal dapat terintegrasi dengan struktur kekuasaan yang ada, serta bagaimana hal ini berdampak pada kehidupan sehari-hari masyarakat (Sitorus, dkk 2022).

8. Dampak terhadap Ketertiban Umum

Kendaraan yang diparkir sembarangan di pinggir jalan sering kali mempersempit ruang untuk lalu lintas kendaraan lain, yang pada akhirnya

meningkatkan risiko kecelakaan. Selain itu, ketika pengelolaan parkir ini melibatkan pemaksaan atau intimidasi terhadap pengguna parkir, hal ini menciptakan lingkungan yang kurang aman dan kurang tertib.

Dalam *state and illegality* juga mencatat bahwa aktivitas informal yang tidak terkontrol oleh negara dapat menimbulkan ketidakteraturan di ruang publik. Dalam konteks pengelolaan parkir tepi jalan oleh Pemuda Pancasila, meskipun ada beberapa aspek positif dari keamanan, seperti menjaga kendaraan dan mencegah pencurian, aktivitas ini juga bisa menyebabkan gangguan terhadap ketertiban umum.

Ketidakteraturan ini dapat memperburuk masalah keamanan di ruang publik, terutama di kawasan perkotaan yang padat. Jika tidak ada mekanisme resmi yang mengontrol atau menertibkan aktivitas parkir, maka konflik kecil bisa dengan mudah meningkat menjadi masalah keamanan yang lebih besar.

“Bisa dibilang membantu, tapi tidak sepenuhnya. Memang, mereka membantu mengatur parkir dengan lebih tertib dibandingkan kalau tidak ada pengelola sama sekali. Kalau ada kendaraan yang parkir sembarangan, mereka langsung menegur. Masalahnya, cara mereka menegur kadang terlalu tegas dan ada yang merasa terintimidasi. Jadi, meskipun membantu, tetap saja ada warga yang merasa sedikit terganggu”. (wawancara Bapak Hendra sebagai pedagang kaki lima/angkringan)

Berdasarkan pernyataan Bapak Hendra sebagai pedagang kaki lima/angkringan bahwa masyarakat umumnya melihat ada dampak positif dari peran Pemuda Pancasila dalam menjaga ketertiban parkir, seperti membantu mengatur kendaraan agar tidak parkir sembarangan dan mengurangi kemacetan. Teori *state and illegality* menyoroti hubungan antara pemerintah

dan aktor ketiga dalam konteks praktik ilegal. Dalam hal ini, pemuda pancasila sering kali beroperasi di luar kerangka hukum resmi dalam pengelolaan parkir. Dampak keterlibatan Pemuda Pancasila dalam pengelolaan parkir tepi jalan terhadap ketertiban umum menunjukkan adanya interaksi kompleks antara praktik ilegal dan struktur kekuasaan yang ada. Meskipun mereka dapat berfungsi sebagai agen penegakan ketertiban, praktik pungutan liar dan konflik antar organisasi sering kali merusak citra mereka dan menciptakan ketidakpastian bagi masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih terintegrasi antara pemerintah dan organisasi masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman dan tertib bagi semua pihak (Abriansyah, 2022).

Dampak dari peran Pemuda Pancasila dalam pengelolaan parkir tepi jalan sangat kompleks, terutama ketika dianalisis melalui teori *state and illegality*. Di satu sisi, mereka mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh negara, memberikan keamanan informal terhadap kendaraan yang diparkir dan menciptakan rasa aman bagi pengendara. Namun, di sisi lain, operasi mereka yang berada di luar kerangka hukum formal menimbulkan berbagai masalah, seperti intimidasi, ketegangan dengan otoritas, konflik dengan masyarakat lokal, dan gangguan terhadap ketertiban umum. Dalam konteks yang lebih luas, keamanan yang mereka sediakan bersifat eksklusif dan kadang-kadang didasarkan pada kekuatan dan kontrol wilayah yang tidak resmi. Sementara teori *state and illegality* menyoroti bagaimana kelompok-kelompok informal ini dapat memiliki legitimasi sosial dalam komunitas tertentu.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Pemuda Pancasila memiliki peran penting dalam pengelolaan parkir tepi jalan yang memberikan dampak pada berbagai aspek kehidupan masyarakat:

1. Pemberdayaan Pemuda: Keterlibatan aktif pemuda dalam mengelola parkir menjadi bentuk pemberdayaan yang dapat meningkatkan keterampilan dan tanggung jawab sosial mereka. Ini memberi kesempatan bagi para pemuda untuk berkontribusi pada lingkungan sekitar dan mengurangi pengangguran.
2. Penataan Parkir dan Ketertiban: Melalui keterlibatan pemuda Pancasila, pengelolaan parkir di tepi jalan menjadi lebih teratur dan tertib, mengurangi parkir liar yang sering menjadi penyebab kemacetan. Ini meningkatkan kelancaran lalu lintas dan membuat area parkir lebih aman dan terstruktur.
3. Keamanan dan Kenyamanan: Dengan adanya pengelola parkir yang terpercaya, pengguna kendaraan merasa lebih aman, baik dari potensi pencurian maupun tindakan kriminal. Kehadiran pemuda sebagai pengelola parkir menciptakan rasa aman dan memberikan kenyamanan bagi pengguna jalan.
4. Kontribusi Ekonomi: Peran pemuda Pancasila dalam pengelolaan parkir juga berdampak positif pada ekonomi lokal. Penghasilan dari parkir yang terkelola dengan baik dapat membantu menopang perekonomian anggota serta memberikan kontribusi ke kas daerah jika dikelola secara resmi.

Peran pemuda Pancasila dalam pengelolaan parkir tepi jalan memberikan dampak positif dari peran Pemuda Pancasila

1. Dampak Ekonomi:

- **Peningkatan Pendapatan Lokal:** Pengelolaan parkir oleh pemuda Pancasila dapat meningkatkan pendapatan daerah melalui tarif parkir yang terkelola dengan baik.
- **Penciptaan Lapangan Kerja:** Inisiatif ini membuka peluang kerja bagi pemuda, mengurangi angka pengangguran, dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi komunitas.

2. Dampak Sosial:

- **Pemberdayaan Pemuda:** Keterlibatan aktif pemuda dalam pengelolaan parkir menumbuhkan rasa tanggung jawab dan kepemimpinan.
- **Meningkatkan Interaksi Sosial:** Pengelolaan yang baik menciptakan lingkungan yang lebih tertib dan harmonis antar warga serta pengendara.

3. Dampak Lingkungan:

- **Pengurangan Polusi:** Pengelolaan parkir yang efisien dapat mengurangi kemacetan lalu lintas, sehingga menurunkan emisi kendaraan.
- **Pemeliharaan Kebersihan:** Pemuda Pancasila turut serta dalam menjaga kebersihan area parkir, mencegah pencemaran lingkungan.

4. Dampak Keamanan:

- **Pengawasan yang Lebih Baik:** Kehadiran pemuda sebagai pengelola parkir meningkatkan tingkat keamanan di area tersebut, mencegah tindak kriminalitas.
- **Penegakan Aturan:** Pemuda Pancasila dapat memastikan aturan parkir ditaati, menciptakan ketertiban dan keamanan bagi semua pengguna jalan.

B. Saran

Agar peran pemuda Pancasila dalam pengelolaan parkir tepi jalan lebih efektif dan memberikan manfaat jangka panjang, beberapa langkah yang dapat diambil adalah:

1. Pelatihan dan Pembekalan Keterampilan:

Memberikan pelatihan tentang manajemen parkir, keterampilan komunikasi, dan penanganan konflik kepada anggota Pemuda Pancasila yang terlibat. Pelatihan ini dapat meningkatkan profesionalitas dan kompetensi dalam pengelolaan parkir.

2. Hubungan simbiosis dengan Pemerintah dan Aparat:

Memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah dan kepolisian untuk memastikan pengelolaan parkir berjalan sesuai aturan yang berlaku. Kolaborasi ini akan membantu menjaga ketertiban serta mengurangi parkir liar.

3. Penerapan Sistem Parkir Modern:

Mengintegrasikan teknologi seperti aplikasi parkir digital atau tiket elektronik untuk mempermudah sistem pembayaran dan pencatatan. Hal ini akan meningkatkan transparansi dan mempermudah pengawasan.

4. Pengawasan Berkala dan Evaluasi:

Pemerintah daerah dan pihak terkait perlu melakukan evaluasi berkala terhadap kinerja pengelolaan parkir oleh Pemuda Pancasila. Umpaman balik dari masyarakat juga penting untuk memperbaiki layanan dan menjaga keberlanjutan.

5. Sosialisasi kepada Masyarakat:

Mengedukasi masyarakat agar mereka lebih paham dan menghargai pentingnya parkir yang tertib. Ini dapat dilakukan melalui sosialisasi dan komunikasi terbuka, sehingga masyarakat mendukung keberadaan pemuda Pancasila sebagai pengelola parkir.

Dengan memperkuat kapasitas, kolaborasi, dan transparansi, diharapkan peran pemuda Pancasila dalam pengelolaan parkir tepi jalan semakin efektif, memberikan manfaat nyata, dan berkelanjutan bagi masyarakat serta lingkungan sekitarnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abriansyah. (2022). Peran Organisasi Masyarakat Pemuda Panasila Dalam Melayani Pengaduan Masyarakat Demi Terciptanya Keamanan dan Keamanan Di Masyarakat Berdasarkan AD-ART Pemuda Pancasila. *JURNAL PSMH UNTAN*.
- Aliffandi, M. J. (2017). Tata Kelola Parkir dan Retribusi Di Kota Malang. *Repostory.ub*.
- Amalinda Savirani, A. S. (2014). Masyarakat Mengalahkan Negara. *Skripsi*.
- Aminah, S. (2022). Dinamika Pengelolaan Parkir di Kawasan Urban. *Jurnal Perencanaan Wilayah*.
- Anggriani D., & S. (2013). Analisis Konsep Parkir Pada Plaza Ekalokasari Bogor. *ASTINJARDO*.
- Arma, N. A. (2023). Implementasi Kebijakan Dinas Perhubungan Kota Medan Dalam Menaggulangi Parkir Tepi Jalan Kecamatan Medan Marelan. *Universitas Dharmawangsa*, 924.
- Bahari, M. (2021). Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Parkir Liar Di Ruas Jalan Jatibarang-Slawi Kabupaten Tegal. *Repostory Amni Semarang*, 1.
- Bartolomeus Marulitua Simanjorang, R. b.-a. (2024). Keterlibatan Organisasi Masyarakat Pemuda Pancasila Dalam Menjaga Kualitas Demokrasi Di Kota Medan. *Journal Of Social Science Research*.
- Daniel Maranata Sitorus, P. A. (2022). Politik Ekonomi Dalam Kebijakan Pengelolaan Parkir Pada Minimarket Di Kecamatan Rawalumbu Kota Bekasi. *ojs.unud.ac*.
- Edward Aspinal, G. V. (2011). *The State and Illegality IN Indonesia*. The Netherlands: KITLV Press.

- Frangky Benjamin Kandioh, J. L. (2016). Eksistensi Kelompok- Kelompok Sosial Dalam Melestarikan Nilai-Nilai Budaya Di Desa Kamngta Kecamatan Tombulu Kabupaten Minahasa. . *Jurnal Ilmu Sosial & Pengelolaan Sumberdaya Pembangunan*.
- Gunawan, M. N. (2023). Implementasi Kebijakan Pengelolaan Parkir Tepi Jalan Umum Kota Semarang Tahun 2022. *Jurnal Lanskap Politik*, 78.
- Hafifah, M. (2020). Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Prkir Liar Di Kota Lama Tahun 2020. *Repostory Universitas Maritim Amni Semarang*, 1.
- Handayani, R. T. (2020). Peran Organisasi Informal dalam Pengelolaan Parkir. *academia.edu*.
- Hobbs, F. (1995). *Perencanaan dan Teknik Lalu Lintas*. Yogyakarta: Universitas Gajah Mada.
- Ichwan Azhari, H. B. (2018). Konflik Antar Organisasi Kemasyarakatan Pemuda Pancasila Di Kota Medan dan Upaya Penyelesaiannya. *Jurnal Antropologi Sumatra*.
- Indraini Hapsari, S. P. (2020). Negara dan ilegalitas: studi kasus perdagangan burung di wilayah Jakarta (State and illegality: a case study of bird trading in the Jakarta region). *Jurnal Antropologi Isu-Isu Sosial Budaya* .
- Irawan, B. (2018, Desemeber). Organisasi Formal Dan Informal: Tinjauan Konsep, Perbandingan, dan Studi Kasus. *Jurnal Administrative Reform*.
- Jolian, G. D. (2020). Peran Pemerintah Kota Bandar Lampung Dalam Penanggulangan Masalah Pungut Liar Parkir Dalam Perspektif Hukum Islam. *Skripsi*.
- Kids, F. A. (2017). Efektivitas Kebijakan Penertiban Parkir Liar Pada Bahu Jalan Dalam Mengurangi Kemacetan Di Kota Makassar Provinsi Sulawesi Tengah. *eprints.ipdn*.

- Kliken, E. A. (2011). *The State and Illegality In Indonesia*. Netherlands: KITLV Press.
- Kurniawan, Y. (2015). Dinamic Intern Conflict Civil Society Organization Study Chases : Pemuda Pancasila Pekanbaru Organization. *Jom FISIP*.
- Lestari, R. (2023). Organisasi Informal dan Pengelolaan Parkir Berkelanjutan. *Jurnal Lingkungan dan Pembangunan*.
- Muhamad Ridho, O. H. (2016). Menjejaki Akses Terhadap Keadilan Dalam Konflik Agraria. *Jurnal Cintra Hukum*.
- Nango, M. N. (2023). Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Parkir Di Kota Bajawa . *Jurnal Publikasi Ilmu Hukum* .
- Nasution, A. F. (2023). Metode Penelitian Kualitatif. *CV. Harva Creative*.
- Naya, F. (2018). Dampak Konflik Terhadap Perekonomian Masyarakat Di Negri Mamalia dan Morella. *jurnl.iainambon*.
- Ni Ketut Lola Agnes Arijesni, B. P. (2019). Politik Ekonomi Pada Industri Hiburan SPA di Kota Denpasar. *publications*.
- Novita, A. P. (2012). Tata Kelola Perparkiran: Pemerintah dan Kekuatan Informal Lainnya (Studi Kasus Plaza Sriwedani dan Malioboro II). *Tesis*.
- Nugroho, F. (2023). Tantangan dan Peluang dalam Pengelolaan Parkir Informal. *Jurnal Transportasi dan Manajemen*.
- Panjaitan, S. (2024). Analisis Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Informal Dalam Perspektif Hukum Ketanagakerjaan. *Jurnal Dunia Ilmu Hukum dan Politik* .
- Putra, M. R. (2022). Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Parkir Tepi Jalan Di Kota Makasar. *Skripsi*.
- Putranto, A. P. (2023). Dampak Parkir Liar Di Perumahan Terhadap Masyarakat Setempat. *Jurnal Mitra Teknik Sipil*.

- Rahmah, S. &. (2016). Evaluasi Terhadap Pengelolaan Prkir Tepi Jalan Umum Di Kawasan Simpang Lima Kota Semarang. *Journal of Politic and Goverment Studies*.
- Rahman, I. P. (2024). Analisis Strategi Pengelolaan Lahan Parkir dalam Perencanaan Pembangunan Untuk Menciptakan Good Governance Di Kabupaten Banyumas. *repository.uinsaizu*.
- Rahmawati, D. (2015). Demokrasi Dalam Genggaman Para Pemburu Rente. *Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 92.
- Rahmawati, N. (2022). Interaksi antara Organisasi Formal dan Informal dalam Pengelolaan Parkir. *Jurnal Administrasi Publik*.
- Ramadani, F. (2023). Pengelolaan Parkir Tepi Jalan Umum Kota Makasar. *Skripsi*.
- Ramadhan, R. (2024). Evektifitas Penertiban Parkir Liar Kota Surabaya Berdasarkan Perda Nomor 3 Tahun 2018. *Jurnal Pneliteian Hukum*.
- Ristomo, N. A. (2023). Ekonomi Politik Parkir LIar Pada Minimarket Di Kota Depok. *eprints.walisongo.ac.id*.
- Rusnaedi. (2022). Strategi Dinas Perhubungan dalam Menanggulangi Parkir Liar di Tepi Jalan Umum Kota Watampone Kabupaten Bone. *Economics and Digital Business Review*, 264.
- Saleh, S. (2017). Analisis Data Kualitatif. *Bandung Pustaka Ramadhan*.
- Santoso, B. (2021). Keterlibatan Masyarakat dalam Pengelolaan Parkir. *Jurnal Sosiologi dan Pembangunan*.
- Sari, A. P. (2023). Hubungan Antara Institusi Pemerintah dan Organisasi Informal Dalam Pengelolaan Perparkiran Tepi Jalan Umum (Studi Kasus Kawasan Malioboro). *Tesis*.

- Satriani, S. (2015). Hubungan Negara-Warga Dan Demokrasi Lokal. *Jurnal Penelitian Politik*.
- Septiani, A. D. (2022). Implementasi Program Literasi Membaca 15 Menit Sebelum Belajar Sebagai Upaya Dalam Meningkatkan Minat Baca. *JURNAL PERSEDA*.
- Setiawan, D. (2021). Pengaruh Organisasi Informal terhadap Efisiensi Pengelolaan Parkir. *Jurnal Manajemen Transportasi dan Logistik*.
- Sutrisno, H. (2023). Analisis Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Kmapar Dalam Menertibkan Parkir Liar Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 12 Tahun 2006 Di Kota Bangkian. *Jurnal Pahlawan*, 37.
- Suwardjokon Warpani. (1990). *Merencanakan Sistem Perangkutan*. Bandung: ITB.
- Syarif Hidayat, A. M. (2015). Good Governance vs Shadow State. *garuda.kemendikbud*.
- Tanjung, A. R. (2022). Upaya Pemerintah Dalam Menyelesaikan Konflik Antar OKP. *Law Development Journal*.
- Trikusuma, A. S. (2022). Memperkuat Karakter Profil Pelajar Pancasila melalui Program Pengolahan Sampah Plastik di SMP Negeri 1 Tembuku. *Jurnal Ilmu Multidisiplin*.
- Wiguna, K. C. (2013). Peranan Organisasi Masyarakat Pemuda Pancasila (Ormas PP). *repository.uma*.
- Wiguna, K. C. (2015). Peranan Organisasi Masyarakat Pemuda Pancasila (ORMAS PP) Dalam Pemuda Di Kecamatan Rercut Sui Tuan Kabupaten Deli Serdang. *Skripsi*.

LAMPIRAN

DOKUMENTASI WAWANCARA

a. Ketua Pemuda Pancasila Ngaliyan

Bapak Mukhtar



b. Pedangang Kaki Lima/Angkringan

Bapak Hendra



c. Masyarakat Sekitar yang menjadi Pedagang

Mas Yudi



d. Pedagang Kaki Lima/Dimsum

Mas Bimo



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama : Aqil Fa'iq Rizki Hadi Saputra
2. NIM : 2006016076
3. Tempat, Tanggal Lahir : Ngawi, 17 Mei 2002
4. Alamat : Regensi 2 Rt 004 Rw 018 Kec. Cibitung
5. Jenis Kelamin : Laki-Laki
6. Agama : Islam
7. No. Hp : 081281171667
8. Email : aqilfaiq1705@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

No	Jenjang Pendidikan	Tahun Kelulusan
1	SDIT Darussalam	2014
2	Mts Darunnajah 2 Cipining	2017
3	MA Darunnajah 2 Cipining	2020

C. Organisasi

- i. Senat Mahasiswa (SEMA) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 2022
- ii. Senat Mahasiswa (SEMA) Universitas Islam Negeri Walisongo 2024
- iii. Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Bhineka 2021